



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN TUAL**

JL. BUKIT DUMAR NO 1, KOMPLEK PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL
KOTA TUAL KODE POS 97611 TELEPON (0916) 21696, FAKSIMILE (0916) 21606
LAMAM www.kkp.go.id SUREL psdkp.tual@kkp.go.id

Nomor : B.2084/PSDKPLan.6/TU.140/VII/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja (LKj)
Periode Triwulan II TA. 2025

18 Juli 2025

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP
di Jakarta

Terkait Pengukuran kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja lingkup Ditjen PSDKP triwulan II tahun 2025 dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pangkalan PSDKP Tual telah menyusun Laporan Kinerja periode Triwulan II TA.2025 sebagaimana dapat dilihat pada link berikut ini https://drive.google.com/drive/folders/1y8iDfJI9YgPMpWwza0B7j4SSb6vIxu8k?usp=drive_link ;
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada aplikasi kinerjajaku periode triwulan II TA. 2025 diperoleh Nilai Pencapaian Sasaran Program (NPSS) sebesar 104,13% dengan kategori baik (skor 90-110%). Capaian tersebut mengindikasikan kinerja capaian kinerja periode triwulan II pada Pangkalan PSDKP Tual mengalami keberhasilan;
3. Terdapat 11 indikator kinerja yang dilakukan penilaian pada triwulan II terdapat 4 indikator kinerja dengan predikat Istimewa dan 7 indikator kinerja dengan predikat baik.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan arahan lebih lanjut kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Tual,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Erik Sostenes

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal PSDKP di Jakarta
2. Inspektur II Inspektorat Jenderal KKP di Jakarta



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

LAPORAN KINERJA

PANGKALAN PSDKP TUAL

KUARTAL II 2025



-5°34'25,035"S 105°2 A

Kecamatan

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif



psdkp.tual



Pangkalan Psdkp Tual



PSDKP_Tual



panganbiru

Kata Pengantar

Syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nyalah Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Tahun 2025 dapat terselesaikan. Pelaksanaan kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) selama triwulan II Tahun 2025 mencapai keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target. Informasi kinerja tersebut disajikan dalam sebuah Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Tahun 2025 Unit Pelaksana Teknis Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual (UPT Pangkalan PSDKP Tual).

Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada UPT Pangkalan PSDKP Tual dalam kurun waktu Triwulan II Tahun 2025. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Kami berharap, Laporan ini dapat menjadi media pertanggung jawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh staff UPT Pangkalan PSDKP Tual dan semua pihak yang terkait. Semoga motivasi yang telah tumbuh dan kerjasama yang telah dibangun dalam membangun kinerja pengawasan SDKP dapat terus ditingkatkan.

Tual, 17 Juli 2025

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Tual



Ditandatangani
Secara Elektronik

Erik Sostenes, S.St.Pi, M.Si

NIP. 198503162007011006

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja (LKj) UPT Pangkalan PSDKP Tual triwulan II Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen. PSDKP Tahun 2020 – 2025 dan Rencana Kinerja Tahunan 2025 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penyusunan LKj pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama triwulan II tahun 2025.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, UPT Pangkalan PSDKP Tual telah menyusun perjanjian kinerja Tahun 2025 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya, selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), juga ditujukan untuk:

1. Menterjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*continuous improvement*)
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

Sasaran Program UPT Pangkalan PSDKP Tual bermuara pada 9 Sasaran Kegiatan , yaitu:

1. Terselenggaranya pembinaan pokmaswas secara efektif;
2. Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif;
3. Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan;
4. Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan;
5. Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif;
6. Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan;
7. Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan;
8. Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan;
9. Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Program, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada Tahun 2025, terdapat 21 indikator kinerja yang menjadi komitmen kinerja UPT Pangkalan PSDKP Tual. NKO yang dicapai pada triwulan II sebesar 104,13 atas 11 indikator kinerja yang dihitung. Berikut kami jabarkan 11 indikator kinerja yang dilaksanakan perhitungan:

1. Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan;
2. Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan;
3. Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual;
4. Indeks peneraan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan;
5. Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan;
6. Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan;
7. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satker lingkup Pangkalan PSDKP Tual;
8. Indeks profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Tual;
9. Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko Pangkalan PSDKP Tual;
10. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan;
11. Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual.

Realisasi anggaran pada triwulan II Tahun 2025 yang telah dicapai oleh Pangkalan Pengawasan SDKP Tual sebesar 31,40% atau sebesar Rp**13,036,156,294,-** (*Tiga belas miliar tiga puluh enam juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah*) dari alokasi anggaran Rp**41,512,621,000,-** (*Empat puluh satu miliar lima ratus dua belas juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah*), dimana terdapat PNBK pada TA. 2025 sebesar Rp**6,603,165,000,-** (*Enam miliar enam ratus tiga juta seratus enam puluh lima ribu rupiah*), melalui laporan kinerja triwulan II tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja guna mendorong pencapaian target pada tahun berikutnya.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
BAB I	8
PENDAHULUAN	8
A. Latar Belakang	8
B. Maksud dan Tujuan	9
C. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	9
D. Data Umum Organisasi	10
E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	14
BAB II	15
PERENCANAAN KINERJA	15
A. Kegiatan Pengawasan SDKP	15
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	15
C. Pengukuran Capaian Kinerja	17
BAB III	18
AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2025	18
1. Capaian Sasaran Kegiatan Pangkalan PSDKP Tual Triwulan II Tahun 2025	18
2. Capaian Kinerja Utama Pangkalan PSDKP Tual Tahun 2025 Tahunan	18
B. Analisis Pencapaian Kinerja	20
1. Sasaran Kegiatan 3: Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	20
2. Sasaran Kegiatan 4: Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	28
3. Sasaran Kegiatan 6: Terselenggaranya pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	35
4. Sasaran Kegiatan 7: Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	36
5. Sasaran kinerja 8: Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	46
6. Sasaran kinerja 9: Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	46
C. Realisasi Anggaran	55



BAB IV	56
PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran dan Rekomendasi.....	56

Daftar Tabel

Tabel 1 Data Armada.....	13
Tabel 2. Komposisi Pegawai Pangkalan Pengawasan SDKP Tual berdasarkan Unit Kerja	14
Tabel 3 Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Tual Tahun 2025	16
Tabel 4 Capaian Kinerja Pangkalan PSDKP Tual Triwulan II Tahun 2025.....	19
Tabel 5 Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Tual Triwulan II Tahun 2025	20
Tabel 6 Pemeriksaan rutin OSS.....	21
Tabel 7 Pengawasan rutin selain OSS.....	21
Tabel 8 Pengawasan insidental	21
Tabel 9 Capaian IK 4	21
Tabel 10 Rekapitulasi pengawasan SDK.....	23
Tabel 11 Rekapitulasi pengawasan pemanfaatan ruang laut.....	25
Tabel 12 rekapitulasi pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	27
Tabel 13 Nilai kualitas pemeriksaan setiap pelaku usaha	28
Tabel 14 Capaian IK 5	29
Tabel 15 Rekapitulasi penerbitan SLO triwulan II per lokasi.....	30
Tabel 16 Rekapitulasi penerbitan SLO triwulan II per bulan.....	30
Tabel 17 Rekap pengawasan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan	31
Tabel 18 Rekap pengawasan budidaya	32
Tabel 19 Rekap pengawasan pengolahan ikan	33
Tabel 20 Rekap pengawasan pemasaran ikan	34
Tabel 21 Capaian IK 8.....	35
Tabel 22 Capaian IK 9	37
Tabel 23 Rekap pengenaan sanksi administratif non SPKP.....	39
Tabel 24 Rekap denda administratif hasil analisis SPKP	41
Tabel 25 Rekap pengenaan sanksi administratif SPKP.....	42
Tabel 26 Rekap sanksi administratif bidang kelautan	43
Tabel 27 Rekapitulasi SPKP	45
Tabel 28 Capaian IK 10.....	45
Tabel 29 Uraian indikator IKPA.....	48
Tabel 30 Capaian IKPA Pangkalan PSDKP Tual	48
Tabel 31 Capaian IK 13.....	48
Tabel 32 Capaian IK 14.....	50
Tabel 33 Capaian IK 16.....	51
Tabel 34 Capaian IK 17.....	52
Tabel 35 Capaian IK 18.....	54
Tabel 36 Saran dan Rencana Tindak Lanjut atas pencapaian kinerja Pangkalan PSDKP Tual Periode Triwulan III 2025.....	56

Daftar Gambar

Gambar 1 Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Tual.....	12
Gambar 2 Wilayah Kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Tual.....	12
Gambar 3 Sistematisa Penyusunan LKj Pangkalan PSDKP Tual	14
Gambar 4 Rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) Pangkalan PSDKP Tual	18
Gambar 5 Dokumentasi Pengawasan Ruang Laut.....	24
Gambar 6 Pengawasan usaha penangkapan ikan	31
Gambar 7 Pengawasan budidaya	32
Gambar 8 Pengawasan pengolahan ikan	33
Gambar 9 Pengawasan pemasaran ikan	34
Gambar 10 Ekspose penetapan sanksi administratif.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks pembangunan kelautan dan perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) berperan dalam penegakan hukum dan peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna menjamin terselenggaranya pemanfaatan dan pengelolaan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab. Peran tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan program/kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui terwujudnya kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja (LKj) triwulan II, UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual Tahun 2025 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah diseminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus Pangkalan Pengawasan SDKP Tual untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Perjanjian Kinerja.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan "*good governance*".

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Pangkalan PSDKP Tual Tahun 2025 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP setiap Tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

2. Tujuan :

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual dari tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan dan evaluasinya. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada setiap Tahun, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik di tahun berikutnya.

C. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Isu aktual pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang menuntut perlunya dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan SDKP di Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Tual, antara lain:

1. Bidang Perikanan Tangkap

- a. Masih terdapat kegiatan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI);
- b. Kegiatan *transshipment* yang dilakukan kapal-kapal tidak sesuai mitra yang tercantum pada dokumen perizinan;
- c. Kapal perikanan yang melakukan migrasi perizinan belum sepenuhnya melengkapi armada penangkapan dengan VMS;
- d. Terdapat kapal perikanan yang memiliki perizinan yang tidak sesuai dengan wilayah operasi;
- e. Kegiatan *destructive fishing* baik pengeboman dan pembiusan yang masih sering terjadi serta minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait jenis ikan yang dilindungi;

- f. Sering terjadi kegiatan operasi penangkapan ikan yang dilakukan kapal ikan Indonesia (KII) di wilayah perairan Papua New Guinea.

2. Bidang Perikanan Budidaya

- a. Pengangkutan ikan hidup yang tidak terkontrol dengan baik terutama kapal angkut ikan hidup dengan ukuran ≤ 30 GT yang tidak menggunakan VMS;
- b. Masih terdapat pelaku usaha yang belum memiliki perizinan dasar yaitu PKKPR.

3. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan

- a. Masih banyaknya UPI yang tidak memiliki SIUP dan SKP;
- b. Terdapat unit usaha yang telah berizin tapi belum melaksanakan aktifitas pengolahan.

4. Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

- a. Kerusakan terumbu karang akibat penambangan karang dan penggunaan alat tangkap yang merusak habitat ikan, seperti: bom, racun, dan *stroom* serta kejadian kapal kandas yang masih sering terjadi di wilayah konservasi
- b. Eksploitasi mangrove.
- c. Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir dan laut.

D. Data Umum Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pangkalan Pengawasan SDKP Tual merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pangkalan PSDKP Tual menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- a) Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- b) Pelaksanaan operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c) Bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
- d) Penyiapan logistik dan pemeliharaan serta operasi kapal pengawas;
- e) Pelaksanaan penanganan pelanggaran sumberdaya kelautan dan perikanan;
- f) Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan

g) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka dalam menjalankan tugasnya Kepala Pangkalan membawahi Kepala Sub Bagian Umum serta membawahi Kelompok Jabatan Fungsional, dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti berikut :

a. Kepala Pangkalan:

Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan di lingkungan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

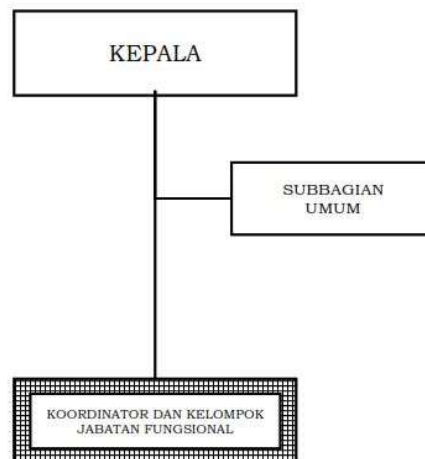
b. Kepala Subbagian Umum:

Melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

c. Kelompok Jabatan Fungsional:

Fungsional Pengawas melaksanakan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk fungsional lainnya disesuaikan dengan bidang tugas fungsional yang diembannya berdasarkan SK fungsional yang telah ditetapkan.

STRUKTUR ORGANISASI PANGKALAN PSDKP TUAL

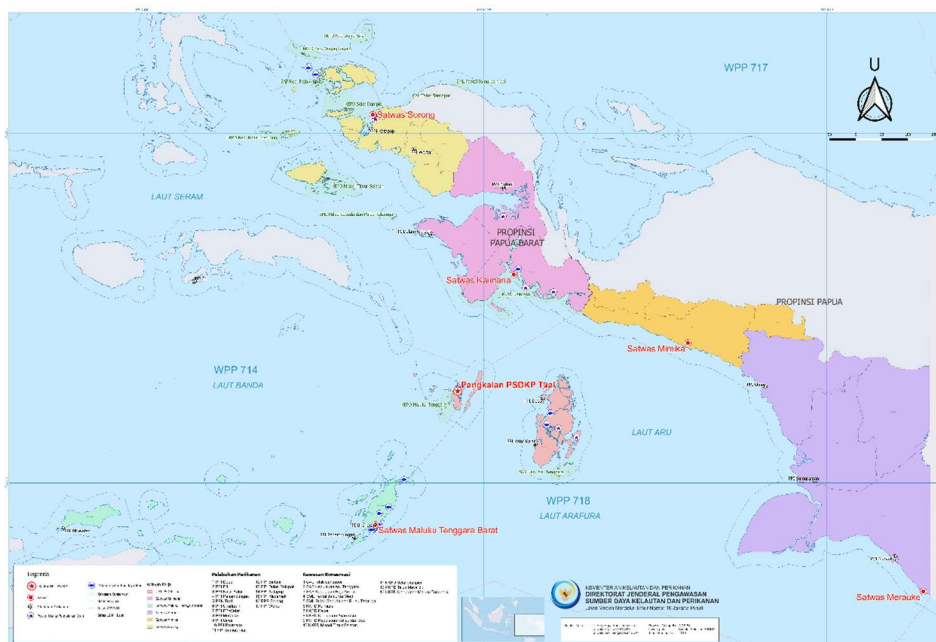


Gambar 1 Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Tual

3. Wilayah Kerja

Wilayah kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Tual meliputi 5 Provinsi (Maluku, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan Papua Selatan) dan 3 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yakni WPP 714, WPP 715, WPP 718.

Untuk lebih jelasnya ditunjukkan pada Gambar berikut:



Gambar 2 Wilayah Kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Tual

Dalam pelaksanaan operasional pengawasan, Pangkalan Pengawasan SDKP Tual memiliki satwas dan wilker yang berada dalam kontrol Pangkalan PSDKP sebagaimana dijabarkan di bawah ini:

Pangkalan PSDKP Tual

- Wilker PSDKP Dobo
- Wilker PSDKP Warabal

1) Satuan Pengawasan SDKP Maluku Tenggara Barat (MTB)

- Wilker PSDKP Kisar

2) Satuan Pengawasan SDKP Sorong

- Wilker PSDKP Sorong Selatan
- Wilker PSDKP Raja Ampat

3) Satuan Pengawasan SDKP Kaimana

- Wilker PSDKP Fak Fak
- Wilker PSDKP Wimro / Teluk Bintuni
- Wilker PSDKP Avona

4) Satuan Pengawasan SDKP Mimika

5) Satuan Pengawasan SDKP Merauke

- Wilker PSDKP Wanam
- Wilker PSDKP Asmat

4. Armada Pengawas dan *Speedboat* Pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Tual

Pangkalan PSDKP Tual dalam melaksanakan kegiatan operasi pengawasan SDKP didukung dengan armada kapal pengawas dan *speedboat* pengawas. Berikut data kapal pengawas, *speedboat* pengawas dan RIB dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 1 Data Armada

No	Nama Kapal	Ukuran Kapal	Lokasi / Pangkalan	Kondisi
1	Hiu 14	32 Meter	Pangkalan PSDKP Tual	Siap Operasi
2	Hiu Macan 06	36 Meter	Pangkalan PSDKP Tual	Siap Operasi
3	Sea Rider	8 meter	Pangkalan PSDKP Tual	Siap Operasi
4	Rubber Boat	5 meter	Wilker Raja Ampat	Siap Operasi
5	Albacore 002	16 Meter	Pangkalan PSDKP Tual	Siap Operasi
6	Napoleon 025	12 Meter	Satwas SDKP Mimika	Siap Operasi
7	Napoleon 042	12 Meter	Wilker Raja Ampat	Siap Operasi
8	Napoleon 049	12 Meter	Wilker PSDKP Warabal	Siap Terbatas
9	Napoleon 050	12 Meter	Satwas SDKP MTB	Siap Operasi
10	Napoleon 018	12 Meter	Satwas SDKP Sorong	Siap Operasi
11	Marlin 014	6 Meter	Wilker PSDKP Fak Fak	Siap Operasi
12	Jetski 1	3 Meter	Pangkalan PSDKP Tual	Siap Operasi
13	Jetski 2	3 Meter	Pangkalan PSDKP Tual	Siap Operasi

Sumber: Bagian Operasi Armada Pangkalan PSDKP Tual

5. Kepegawaian

Jumlah keseluruhan pegawai Pangkalan Pengawasan SDKP Tual sampai Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 142 orang, yang terdiri dari PNS Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP sebanyak 81 orang, 9 orang PPPK dan tenaga kontrak sebanyak 52 orang, untuk lebih jelasnya ditunjukkan pada Tabel di bawah:

Tabel 2. Komposisi Pegawai Pangkalan Pengawasan SDKP Tual berdasarkan Unit Kerja

No.	Unit Kerja	PNS	PPPK	PPNPN	Jumlah
1	Pangkalan Pengawasan SDKP Tual	27	2	29	58
	- Wilker Pengawasan SDKP Dobo	2	-	3	5
	- Wilker Pengawasan SDKP Warabal	-	-	2	2
2	Satuan Pengawasan SDKP Sorong	8	-	3	11
	- Wilker Pengawasan SDKP Sor Sel	-	-	-	-
	- Wilker Pengawasan SDKP Raja Ampat	2	-	1	3
3	Satwas Pengawasan SDKP Merauke	9	-	2	11
	- Wilker Pengawasan SDKP Wanam	-	-	-	-
4	Satuan Pengawasan SDKP Maluku Tenggara Barat	3	-	1	4
	- Wilker Pengawasan SDKP Kisar	-	-	-	-
5	Satuan Pengawasan SDKP Kaimana	2	-	3	5
	- Wilker Pengawasan SDKP Wimro	-	-	1	1
	- Wilker Pengawasan SDKP Fak Fak	2	-	2	4
6	Satuan Pengawasan SDKP Mimika	5	-	2	7
	- Wilker Pengawasan SDKP Asmat	-	-	-	-
7	KP. Hiu Macan 06	11	3	2	16
8	KP. Hiu 14	7	3	1	11
9	KP. Macan Tutul 01	-	1	-	1
10	Tugas Belajar	3	-	-	3
	Total	81	9	52	142

Sumber: Kepegawaian Sub Bagian Umum Pangkalan PSDKP Tual

E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Tual berdasarkan Permen KP nomor 35 tahun 2023 diuraikan sebagai berikut :



Gambar 3 Sistematika Penyusunan LKj Pangkalan PSDKP Tual

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Kegiatan Pengawasan SDKP

Rumusan kegiatan tingkat UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual, yang merupakan turunan dari fungsi eselon II Ditjen PSDKP, meliputi:

- Kegiatan Pemantauan dan Operasi Armada;
- Kegiatan Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan;
- Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan;
- Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan; dan
- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pangkalan PSDKP Tual.

Selain kegiatan di atas Pangkalan PSDKP Tual juga berperan aktif dan terlibat dalam mendukung program ekonomi biru Menteri kelautan dan perikanan

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ⁽³⁾ Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Pangkalan PSDKP Tual telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya. Selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh KKP, juga ditujukan untuk:

1. Menerjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*continuous improvement*);
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

Indikator Kinerja Pangkalan PSDKP Tual dituangkan dalam Perjanjian Kinerja sebagaimana tabel berikut;

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Tual Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Terselenggaranya pembinaan pokmaswas secara efektif	1.	Indeks kualitas pembinaan pokmaswas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (indeks)	82
2.	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	2.	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (nilai)	75
		3.	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan (nilai)	75
3.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	4.	Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (indeks)	100
4.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	5.	Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan (indeks)	100
5.	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	6.	Indeks operasi kapal pengawas (indeks)	92
		7.	Indeks operasi speedboat pengawas (indeks)	92
6.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	8.	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%)	100
7.	Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	9.	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	81
		10.	Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	81
8.	Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	11.	Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan (indeks)	94
9.	Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12.	Nilai kinerja perencanaan anggaran satker Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	71,5
		13.	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satker lingkup Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	92
		14.	Indeks profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Tual (indeks)	81
		15.	Penilaian mandiri SAKIP satker Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	86
		16.	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko Pangkalan PSDKP Tual (%)	100
		17.	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95
		18.	Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	88,5
		19.	Nilai pengawasan kearsipan internal Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	80
		20.	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Tual (inovasi)	1
		21.	Nilai implementasi program budaya kerja (nilai)	70

Selama triwulan II tahun 2025 Pangkalan PSDKP Tual telah melakukan 1 kali revisi perjanjian kinerja pada tanggal 17 Maret 2025 yang merupakan perubahan atas kepala Pangkalan PSDKP Tual. Perjanjian Kinerja awal maupun revisi Pangkalan PSDKP Tual tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran I.

C. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual Indikator Kinerja. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja Tahunan didukung dengan pengukuran pada aplikasi “Kinerjaku” yang merupakan aplikasi Pengelolaan Kinerja berbasis informasi teknologi (dapat diakses di www.kinerjaku.kkp.go.id).

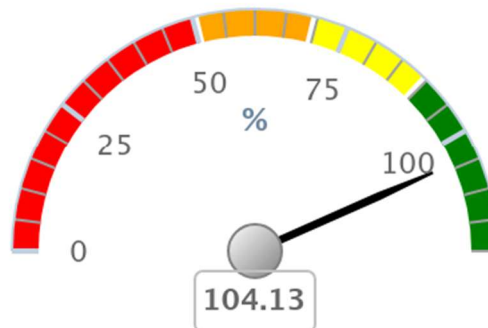
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2025

1. Capaian Sasaran Kegiatan Pangkalan PSDKP Tual Triwulan II Tahun 2025

Berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2025, Pangkalan PSDKP Tual telah menyempurnakan dan menetapkan 9 Sasaran Kegiatan dengan 21 Indikator Kinerja yang terdiri atas 11 IKU dan 10 IKM. Nilai Rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Program (NPSS) Pangkalan PSDKP Tual sebesar 104,13% untuk triwulan II.



Sumber: SAPK (kinerjaku.kkp.go.id)

Gambar 4 Rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) Pangkalan PSDKP Tual

Rata-rata NPSK diperoleh dari akumulasi penghitungan capaian seluruh sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi kontrak kinerja antara Kepala Pangkalan PSDKP Tual dengan Direktur Jenderal PSDKP. Adapun Nilai setiap sasaran kegiatan merupakan hasil penghitungan atas 11 indikator kinerja utama yang menjadi parameter tercapainya sasaran kegiatan. Capaian masing-masing sasaran kegiatan dan IKU serta IKM pembentuk NPSK akan diuraikan lebih lanjut.

2. Capaian Kinerja Utama Pangkalan PSDKP Tual Tahun 2025 Tahunan

Capaian kinerja triwulan II Tahun 2025 mendapat hasil yang baik dengan NPSK dengan kategori baik dengan perolehan diatas 100%. Capaian triwulan II Pangkalan PSDKP Tual ditabulasikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4 Capaian Kinerja Pangkalan PSDKP Tual Triwulan II Tahun 2025

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Target 2025	Target JUNI	Capaian JUNI	%
S.01	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif						
IKS.1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (indeks)	Indeks	Maximize	82	0		
S.02	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif						
IKS.02.1	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (nilai)	Nilai	Maximize	75	0		
IKS.02.2	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan (nilai)	Nilai	Maximize	75	0		
S.03	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan					100	
IKS.03.1	Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (indeks)	Indeks	Maximize	100	100	100	100
S.04	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan					100	
IKS.04.1	Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan (indeks)	Indeks	Maximize	100	100	100	100
S.05	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif						
IKS.05.1	Indeks operasi kapal pengawas (indeks)	Indeks	Maximize	92	0		
IKS.05.2	Indeks operasi speedboat pengawas (indeks)	Indeks	Maximize	92	0		
S.06	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan					100	
IKS.06.1	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	%	Maximize	100	100	100	100
S.07	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan					115,71	
IKS.07.1	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	Indeks	Maximize	81	70	81	115,71
IKS.07.2	Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	Indeks	Maximize	81	70	81	115,71
S.08	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan					100	
IKS.08.1	Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan (indeks)	Indeks	Maximize	94	70	70	100
S.09	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan					109,07	
IKS.09.1	Nilai kinerja perencanaan anggaran satker Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	Nilai	Maximize	71,5	0		
IKS.09.10	Nilai implementasi program budaya kerja (nilai)	Nilai	Maximize	70	0		
IKS.09.2	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satker lingkup Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	Nilai	Maximize	92	72	97,88	120
IKS.09.3	Indeks profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Tual (indeks)	Indeks	Maximize	81	77	80,83	104,97
IKS.09.4	Penilaian mandiri SAKIP satker Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	Nilai	Maximize	86	0		
IKS.09.5	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko Pangkalan PSDKP Tual (%)	%	Maximize	100	100	100	100
IKS.09.6	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	%	Maximize	95	95	100	105,26
IKS.09.7	Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	Nilai	Maximize	88,5	88,5	99,19	112,08
IKS.09.8	Nilai pengawasan kearsipan internal Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	Nilai	Maximize	80	0		
IKS.09.9	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Tual (inovasi)	Inovasi	Maximize	1	0		

Pada triwulan II tahun 2025 Pangkalan PSDKP Tual dalam aktualisasinya telah melaksanakan penilaian terhadap 11 IK dengan kriteria 7 IK dengan predikat baik, 4 IK dengan predikat istimewa. Pelaksanaan kegiatan dalam pemenuhan IK dimaksud terdapat kendala maupun faktor pendukung yang mendorong tercapainya kegiatan atas IK yang telah ditetapkan

untuk dilaksanakan sepanjang triwulan II tahun 2025. Realisasi anggaran pada triwulan II Tahun 2025 yang telah dicapai oleh Pangkalan Pengawasan SDKP Tual sebesar 34,71% atau sebesar Rp**13,036,156,294,-** (*Tiga belas miliar tiga puluh enam juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah*) dari alokasi anggaran Rp**41,512,621,000,-** (*empat puluh satu miliar lima ratus dua belas juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah*).

Tabel 5 Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Tual Triwulan II Tahun 2025

NO	Kode Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	Lain.Lain	Transfer	
1	2350 Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	PAGU REALISASI	0 0.00%	17,997,404,000 4,276,360,812 (23.76%)	1,366,000,000 49,539,283 (3.63%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	19,363,404,000 4,325,900,095 (22.34%)
		SISA	0	13,721,043,188	1,316,460,717	0	0	0	0	0	0	15,037,503,905
2	2351 Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	PAGU REALISASI	0 0.00%	256,615,000 13,409,357 (5.23%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	256,615,000 13,409,357 (5.23%)
		SISA	0	243,205,643	0	0	0	0	0	0	0	243,205,643
3	2352 Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	PAGU REALISASI	0 0.00%	1,737,869,000 70,523,971 (4.06%)	72,000,000 (0.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	1,809,869,000 70,523,971 (3.90%)
		SISA	0	1,667,345,029	72,000,000	0	0	0	0	0	0	1,739,345,029
4	2353 Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	PAGU REALISASI	0 0.00%	100,000,000 (0.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	100,000,000 (0.00%)
		SISA	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000
5	2355 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	PAGU REALISASI	11,668,752,000 6,265,338,328 (53.69%)	8,130,211,000 2,330,564,993 (28.67%)	183,770,000 30,419,550 (16.55%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	19,982,733,000 8,626,322,871 (43.17%)
		SISA	5,403,413,672	5,799,646,007	153,350,450	0	0	0	0	0	0	11,356,410,129
GRAND TOTAL		PAGU REALISASI	11,668,752,000 6,265,338,328 (53.69%)	28,222,099,000 6,690,859,133 (23.71%)	1,621,770,000 79,958,833 (4.93%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	41,512,621,000 13,036,156,294 (31.40%)
		SISA	5,403,413,672	21,531,239,867	1,541,811,167	0	0	0	0	0	0	28,476,464,706

B. Analisis Pencapaian Kinerja

Triwulan II Tahun 2025 Pangkalan PSDKP Tual telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Analisis pada setiap sasaran kegiatan diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 3: Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan

Sasaran Kegiatan ketiga menghasilkan 1 indikator kinerja utama yang ditetapkan Pangkalan PSDKP Tual yaitu "Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (indeks)".

a. IK 4: Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (indeks)

Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan adalah ukuran pelaksanaan tugas dan fungsi pemeriksaan terhadap pelaku usaha kelautan. Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan merupakan gabungan dari beberapa komponen indikator (*composite index*) yang diukur berdasarkan bobot tertentu. Formula dalam menghitung capaian indikator kinerja indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan dijabarkan sebagai berikut.

$$X = (a \times 45\%) + (b \times 40\%) + (c \times 15\%)$$

Keterangan:

- X : Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan
 a : Nilai penyelesaian pemeriksaan rutin OSS
 b : Nilai penyelesaian pemeriksaan rutin selain OSS
 c : Nilai penyelesaian pemeriksaan insidental

Tabel 6 Pemeriksaan rutin OSS

No	Tahapan	Nilai	Output
1	Persiapan	15	- Rencana Pengawasan Tahunan (5) - Surat Tugas Kunjungan Lapangan (10)
2	Pelaksanaan	65	- Berita Acara Pengawasan (30) - Berita Acara Pemeriksaan dari OSS (35)
3	Pelaporan	20	Laporan dengan lampiran dokumentasi dan salinan dokumen perizinan yang disampaikan kepada Direktur PSDK

Tabel 7 Pengawasan rutin selain OSS

No	Tahapan	Nilai	Output
1	Persiapan	15	- Rencana Pengawasan Tahunan (5) - Surat Tugas (5) - Surat pemberitahuan kepada pelaku usaha (5)
2	Pelaksanaan	65	Berita Acara Pengawasan
3	Pelaporan	20	Laporan dengan lampiran dokumentasi dan salinan dokumen perizinan yang disampaikan kepada Direktur PSDK

Tabel 8 Pengawasan insidental

No	Tahapan	Nilai	Output
1	Persiapan	15	- Surat Tugas (7.5) - Surat pemberitahuan kepada pelaku usaha (7.5)
2	Pelaksanaan	65	Berita Acara Pengawasan
3	Pelaporan	20	Laporan dengan lampiran dokumentasi dan salinan dokumen perizinan yang disampaikan kepada Direktur PSDK

Tabel 9 Capaian IK 4

Indikator Kinerja				Target		Realisasi		
				TW II	2025	TW II 2025	s/d TW II	TW II 2024
Indeks	pemeriksaan	pelaku	usaha	100	100	100	100	-
kelautan (indeks)								

Dari tabel di atas dapat kita lihat jika capaian kinerja untuk IK indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan selama triwulan II telah optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan. IK ini merupakan IK baru sehingga belum dapat dibandingkan dengan IK tahun sebelumnya.

Analisa penyebab keberhasilan yang dilaksanakan Pangkalan PSDKP Tual agar mendapatkan capaian yang sempurna dalam memenuhi IKU dimaksud antara lain:

1. Melakukan rapat perencanaan terkait objek pengawasan, sehingga pelaksanaan pengawasan sesuai dengan regulasi yang berlaku;
2. Mengumpulkan informasi pendahuluan, yang bertujuan agar meminimalisir masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan misalnya lokasi unit usaha, transportasi yang akan digunakan, potensi persoalan yang timbul karena pengawasan;
3. Melakukan pemantapan terhadap peraturan yang berhubungan langsung dengan objek pengawasan, dengan internalisasi peraturan maupun kebijakan terbaru yang berkaitan dengan objek pengawasan;
4. Melakukan *sharing session* dengan instansi terkait guna menyamakan persepsi dan penguasaan kondisi terhadap objek pengawasan agar pelaksanaan pengawasan lebih profesional dan bertanggungjawab terutama dalam penentuan luasan wilayah pemanfaatan dalam pengawasan ruang laut;
5. Memenuhi tahapan pelaksanaan sebagaimana yang termuat dalam informasi indikator kinerja, agar pelaksanaan pengawasan terstruktur serta pengukuran kinerja dapat terlaksana.

Analisa kegiatan lain yang menunjang pencapaian yaitu:

1. Briefing rutin yang dilakukan sebagai upaya dalam meneruskan informasi serta teknis pengawasan maupun isu terkini di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Tual, sehingga distribusi informasi menjadi merata dan pengawasan dapat dilaksanakan dengan optimal;
2. Perencanaan dan penganggaran, kegiatan tersebut erat kaitannya dengan capaian organisasi mengingat alokasi anggaran terhadap kebutuhan pengawasan dan yang menunjang pengawasan perlu direncanakan dan ditetapkan dengan perhitungan yang sesuai;
3. Pendistribusian pengawas kelautan pada beberapa satwas dan wilker.

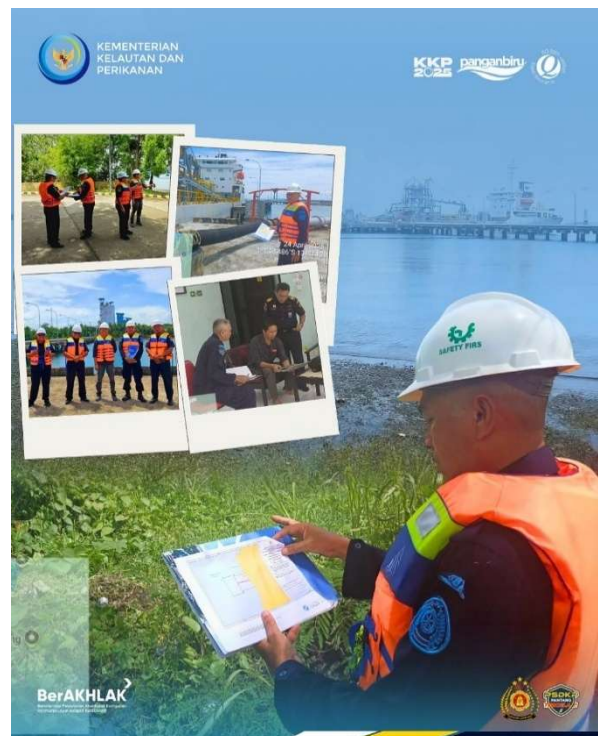
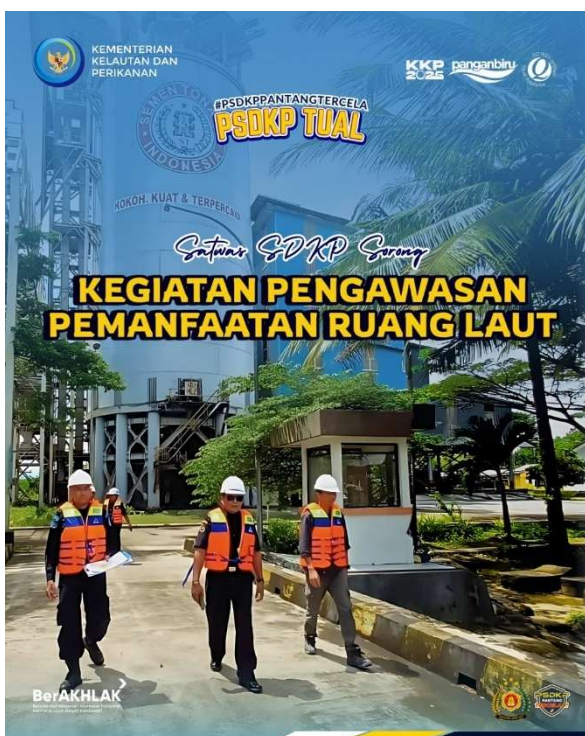
Sampai dengan triwulan II pengawasan sumber daya kelautan telah dilaksanakan pada pemanfaatan ruang laut dan pulau-pulau kecil. Realisasi pada kegiatan pengawasan sumber daya kelautan sebesar 88,13% atau sebesar Rp41,373,051 dari total anggaran sebesar Rp46,944,000 pagu tersedia yang mana jumlah pagu tersebut adalah pagu setelah efisiensi.

Tabel 10 Rekapitulasi pengawasan SDK

No	Unit Pelaksana Teknis	Jumlah Unit/Pelaku Usaha Yang Terperiksa PANGKALAN PSDKP TUAL						Jumlah Pelaku Usaha		
		SDK TAHUN 2025								
		KKPN		PWP3K		PRL				
		Taat	Tidak Taat	Taat	Tidak Taat	Taat	Tidak Taat	Taat	Tidak Taat	Total
1	Pangkalan PSDKP Tual							2	0	2
2	Wilker PSDKP Dobo							0	0	0
3	Satwas PSDKP Sorong				2	2	3	3	5	8
4	Wilker PSDKP Raja Ampat							0	0	0
5	Satwas PSDKP Merauke							0	0	0
6	Satwas PSDKP Kaimana							0	0	0
7	Wilker PSDKP Fak-Fak							0	0	0
8	Satwas PSDKP Mimika							0	0	0
9	Satwas PSDKP Maluku Tenggara Barat					1		1	0	1
Jumlah		0	0	0	2	3	3	3	5	8
		0		2		6		8		

a.1 Pemeriksaan pelaku usaha pemanfaatan ruang laut.

Pengawasan PRL dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut. Pencapaian kinerja sampai triwulan II Tahun 2025 diperoleh dari kegiatan Pengawasan terhadap 6 pelaku usaha yang melakukan pemanfaatan terhadap ruang laut. Kegiatan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang laut adalah kegiatan yang tidak berdiri sendiri, dimana PKKPRIL adalah perizinan dasar yang wajib dipenuhi selama pelaku usaha memanfaatkan ruang laut sebelum melengkapi perizinan berusaha lainnya. pengawasan PKKPRIL erat kaitannya dengan pengawasan budidaya dan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga kedudukan perizinan PKKPRIL sangat urgent diawasi untuk memastikan kelaikan dokumen lainnya.



Gambar 5 Dokumentasi Pengawasan Ruang Laut

Tabel 11 Rekapitulasi pengawasan pemanfaatan ruang laut

NO	TANGGAL PENGAWASAN	LOKASI PENGAWASAN	PELAKU USAHA	Nomor PKKPR	KETAATAN		URAIAN	REKOMENDASI
				Terbit PKKPR	TAAT	TIDAK TAAT		
1. SATUAN PSDKP MALUKU TENGGARA BARAT								
1	13 Maret 2025	Desa Ilngei, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku.	Nama Pelaku Usaha : PT. Mina Timur Indonesia Nama Penanggungjawab : Claudio Canigia NIB : 9120202111174 Jenis Kegiatan Usaha : - KBLI 10213 (Industri Pembekuan Ikan) - KBLI 10293 (Industri Pembekuan Biota Air Lainnya)- KBLI 46206 (Perdagangan Besar Hasil Perikanan) Detail Kegiatan : Dermaga Tambat Labuh Kapal Lokasi: Desa Ilngei, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Titik Koordinat : 07°54'42"S 131°20'29"E Luas pemanfaatan : 0,92 Ha (Sesuai PKKPR) NPWP : 31.684.434.9-807.001 Status Modal : PMDN Tanggal Penerbitan PKKPR : 17 Januari 2019 PKKPR : 221240518100020 Instansi Penerbit : Menteri Investasi dan Kepala BKPM	Tanggal Penerbitan PKKPR : 17 Januari 2019 PKKPR : 221240518100020 Titik Koordinat : 07°54'42"S 131°20'29"E Luas pemanfaatan : 0,92 Ha (Sesuai PKKPR)	v		Dari hasil inspeksi lapangan saat ini belum ditemukan adanya dugaan terjadinya/pelanggaran di bidang pemanfaatan ruang laut karena mengingat Pembangunan dermaga belum selesai dibuat. Pengawasan selanjutnya akan dilakukan pada saat Pembangunan dermaga tambat labuh kapal telah selesai dilakukan.	Disampaikan juga kepada pelaku usaha agar memperhatikan kondisi ekosistem perairan di sekitar dan tidak melakukan kegiatan pencemaran laut, yaitu hasil pembuangan sampah/limbah kegiatan Perusahaan.
2 SATUAN PSDKP SORONG								
1.	20 Februari 2025.	Selat Dampar, Papua Barat	Nama Pelaku Usaha : JULIO FRANCO SUTRISNO NIB : 1803220035271 Jenis Kegiatan Usaha : - KBLI 43120 (Penyiapan Lahan) - KBLI 56101 (Restoran) Detail Kegiatan : Rumah Makan dan Dermaga Wisata Lokasi: Selat Dampar, Provinsi Papua Barat. Titik Koordinat : I. 131° 14'48,139" BT - 0°50'53,425" LS II. 131° 14'35,337" BT - 0°51'1,678" LS III. 131° 14'35,644" BT - 0°51'2,155" LS IV. 131° 14'34,282" BT - 0°51'3,033" LS V. 131° 14'32,461" BT - 0°51'0,174" LS VI. 131° 14'33,810" BT - 0°50'59,297" LS VII. 131° 14'34,117" BT - 0°50'59,776" LS VIII. 131° 14'44,180" BT - 0°50'53,236" LS Luas pemanfaatan : 3,43 Ha Skala Usaha : Usaha Kecil Tingkat Resiko : Tinggi NPWP : 94.508.649.4-026.000 Status Modal : PMDN Tanggal Penerbitan PKKPR : 9 Januari 2023 PKKPR : 09012310519200002 Instansi Penerbit : a/n MEN.KP- Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	Tanggal Penerbitan PKKPR : 9 Januari 2023 PKKPR : 09012310519200002 Titik Koordinat : I. 131° 14'48,139" BT - 0°50'53,425" LS II. 131° 14'35,337" BT - 0°51'1,678" LS III. 131° 14'35,644" BT - 0°51'2,155" LS IV. 131° 14'34,282" BT - 0°51'3,033" LS V. 131° 14'32,461" BT - 0°51'0,174" LS VI. 131° 14'33,810" BT - 0°50'59,297" LS VII. 131° 14'34,117" BT - 0°50'59,776" LS VIII. 131° 14'44,180" BT - 0°50'53,236" LS Luas pemanfaatan : 3,43 Ha	v		Dari hasil analisa data yang ada dapat disimpulkan, hal-hal sebagai berikut : 1. Pemanfaatan ruang laut oleh usaha perorangan Julio Franco Sutrisno sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Tidak ditemukan pelanggaran dan kondisi lingkungan disekitar lokasi usaha terpantau baik. 3. Terlambat menyampaikan laporan tahunan periode 2024 dan belum menyampaikan laporan tahunan 2025	1. Perlunya koordinasi lintas instansi sehubungan dengan kegiatan reklamasi yang dilakukan didalam zoan diluar kewenangan kementerian kelautan dan perikanan. 2. Perlunya peningkatan SDM petugas pengawas kelautan, dan peningkatan sarana dan prasaran yang digunakan dalam melakukan kegiatan pengawasan.
2.	24 Februari 2025.	Jl. Obet Mubalus No. 999 Distrik Maladumes Kelurahan Saoka, Kota Sorong Prov Papua Barat Daya	Nama Pelaku Usaha : PT. Papua Resort NIB : 0230000932444 Jenis Kegiatan Usaha : Restoran Detail Kegiatan : Wisata Bahari Lokasi: Jl. Obet Mubalus No. 999 Distrik Maladumes Kelurahan Saoka, Kota Sorong Prov Papua Barat Daya Titik Koordinat : I. 131° 15'54,684" BT - 0°48'38,206" LS II. 131° 15'54,839" BT - 0°48'38,176" LS III. 131° 15'59,428" BT - 0°48'36,925" LS IV. 131° 16'0,125" BT - 0°48'41,227" LS V. 131° 15'56,370" BT - 0°48'42,509" LS Luas pemanfaatan : 1.87 Ha	Tanggal Penerbitan PKKPR : 30 Desember 2022 PKKPR : 30122210519200001 Titik Koordinat : I. 131° 15'54,684" BT - 0°48'38,206" LS II. 131° 15'54,839" BT - 0°48'38,176" LS III. 131° 15'59,428" BT - 0°48'36,925" LS IV. 131° 16'0,125" BT - 0°48'41,227" LS V. 131° 15'56,370" BT - 0°48'42,509" LS Luas pemanfaatan : 1,87 Ha	v		Dari hasil analisa data yang ada dapat disimpulkan, hal-hal sebagai berikut : 1. Pemanfaatan ruang laut oleh usaha perorangan PT. Papua Resort sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. PT. Papua Resort belum membuat laporan tahunan pemanfaatan ruang laut tahun periode 2023 & 2024 3. Kondisi perairan disekitar lokasi PT. Papua Resort terpantau dalam kondisi baik.	Bertolak dari kesimpulan yang ada, maka hal-hal yang disarankan adalah sebagai berikut: 1. Perlunya koordinasi lintas instansi sehubungan dengan kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang laut agar kesimpulan atau rekomendasi yang diberikan sesuai dengan fakta yang ada. 2. Perlunya peninekatan SDM



			Kedalaman : 4 meter. NPWP : 03.082.758.8-951.000 Status Modal : PMA Tanggal Penerbitan PKKPR : 30 Desember 2022 PKKPR : 30122210519200001 Instansi Penerbit : a/n MEN.KP-Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal			petugas pengawas kelautan, dan peningkatan sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan kegiatan pengawasan. 3. PT. Papua Resort dihimbau untuk menyampaikan laporan tahunan melalui aplikasi e-sea.kkp.go.id.	
3.	24-Apr-25	Papua Barat daya, Kompleks Kek Arar	Nomor PKKPR : 22122310519200001 Nama Pelaku Usaha : PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Tanggal terbit : 22 Desember 2023 Status Penanaman Modal : PMDN KBLI : 82920 Kegiatan Usaha : Aktivitas Pengemasan Detail Kegiatan Usaha : Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Luas/Panjang : 7,85 Ha Kedalaman : 12 M	Tanggal Penerbitan PKKPR : 22 Desember 2023 PKKPR : 22122310519200001 Luas pemanfaatan : 1,87 Ha	v	Dari hasil analisa data yang ada dapat disimpulkan, hal-hal sebagai berikut : 1. Pemanfaatan ruang laut oleh usaha perorangan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk telah membuat laporan tahunan pemanfaatan ruang laut. 3. Kondisi perairan disekitar lokasi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk terpantau dalam kondisi baik.	Bertolak dari kesimpulan yang ada, maka hal-hal yang disarankan adalah sebagai berikut: 1. Perlunya koordinasi lintas instansi sehubungan dengan kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang laut agar kesimpulan atau rekomendasi yang diberikan sesuai dengan fakta yang ada. 2. Perlunya peningkatan SDM petugas pengawas kelautan, dan peningkatan sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan kegiatan pengawasan.
4	9 Mei 2025	Jalan Kasuari, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat.	Nama : PT. Sagawin Sentosa Maritim Alamat : Jl. Kapitan Pattimura Kelurahan SuprauwDistrik Maladum Mes Kota Sorong, Prov. PapuaBarat Day NPWP : - NIB : 2707230116221 KBLI : 52221 – Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut HP : 081344229999 Email : sagawainsentosamaritim@gmail.com Status Modal : PMDN	TIDAK MEMILIKI DOKUMEN PKKPR	v	Dari hasil analisa data yang ada dapat disimpulkan, hal-halsebagai berikut :1. Pemanfaatan ruang laut oleh usaha perorangan PT. Sagawin Sentosa Maritim belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dikarenakanbelum memiliki dokumen perizinan dasar PKKPR; 2. Luasan ruang laut yang dimanfaatkan menurut hasil inspeksidilapangan bersama tim dari LPSPL Sorong sekitar 0,79 hektar; 3. Kegiatan Reklamasi diawali oleh perusahaan sebelum PT. SagawinSentosa Maritim dan dilanjutkan kembali oleh PT. Sagawin SentosaMaritim pada tahun 2024. 4. PT. Sagawin Sentosa Maritim terindikasi melakukan pelanggaranPemanfaatan ruang laut	Bertolak dari kesimpulan yang ada, maka hal-hal yang disarankanadalah sebagai berikut:1. Akan dilakukan Penanganan lebih lanjut terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Sagawin Sentosa Maritim, sessuai denganketentuan yang belaku;
5	8 Mei 2025	Jl. Pengalengan Klalin 1, Desa/Kelurahan Klabinain, Kec. Aimas, Kab. Sorong, Provinsi Papua Barat Daya	Nomor PKKPR : 06102310519600002 Nama Pelaku Usaha : PT. Dokindo Aimas Papua Tanggal terbit : 06 Oktober 2023 Status Penanaman Modal : PMDN KBLI : - Kegiatan Usaha : Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung Detail Kegiatan Usaha : Pengembangan Fasilitas Galangan Kapal Luas/Panjang : 5,06 Ha Kedalaman : 4 M	Tanggal terbit : 06 Oktober 2023 Nomor PKKPR : 06102310519600002 Luas/Panjang : 5,06 Ha	v	Dari hasil analisa data yang ada dapat disimpulkan, hal-hal sebagai berikut : 1. Pemanfaatan ruang laut oleh pelaku usaha PT. Dokindo Aimas Papua sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. PT. Dokindo Aimas Papua telah menyampaikan laporan tahunan pemanfaatan ruang laut. 3. Kondisi perairan disekitar lokasi PT. Dokindo Aimas Papua terpantau	Bertolak dari kesimpulan yang ada, maka hal-hal yang disarankan adalah sebagai berikut: 1. Perlunya koordinasi lintas instansi sehubungan dengan kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang laut agar kesimpulan atau rekomendasi yang diberikan sesuai dengan



	dalam kondisi baik.	fakta yang ada. 2. Perlunya peningkatan SDM petugas pengawas kelautan, dan peningkatan sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan kegiatan pengawasan.
--	---------------------	--

a.2 Pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Pencapaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2025 diperoleh dari kegiatan Pengawasan terhadap 2 pelaku usaha di wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil. Kegiatan utama pengawasan Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil meliputi pengawasan Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil, dan supervisi kegiatan pengawasan di Satwas dan Wilker lingkup Pangkalan PSDKP Tual. Berikut data pengawasan pelaku usaha di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilaksanakan.

Tabel 12 rekapitulasi pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

No	Jenis	Pelaku Usaha	Waktu Pengawasan	Lokasi	Jenis kegiatan	Dokumen perizinan	Ada dokumen perizinan	Tidak ada dokumen perizinan	Ya (sesuai pelaksanaan kegiatan)	Tidak (sesuai pelaksanaan kegiatan)
A	Pangkalan PSDKP Tual (Wilker PSDKP Raja Ampat)									
1	PMDN	PT. Kawei Sejahtera Mining	9 Juni 2025	Raja Ampat	Pertambangan Bijih Nikel	dokumen PKKPR Nomor 18082310519200001 diterbitkan tanggal 18 Agustus 2023 dengan luasan 12.99 Ha.	2 (NIB dan PKKPR)	1 (Izin pemanfaatan pulau-pulau kecil)	2 (NIB dan PKKPR)	1 (Izin pemanfaatan pulau-pulau kecil)
2	PMDN	PT. GAG Nikel	10 Juni 2025	Raja Ampat	Pertambangan Bijih Nikel	dokumen PKKPR Nomor 2607241051920001 diterbitkan tanggal 26 Juli 2024 dengan luasan 14,77 Ha	2 (NIB dan PKKPR)	1 (Izin pemanfaatan pulau-pulau kecil)	2 (NIB dan PKKPR)	1 (Izin pemanfaatan pulau-pulau kecil)

2. Sasaran Kegiatan 4: Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan

Sasaran kegiatan terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan menurunkan 1 indikator kinerja utama yang ditetapkan Pangkalan PSDKP Tual yaitu "Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan". IK ini mengalami perubahan nama akan tetapi mekanisme perhitungannya tetap sama dengan IK tahun sebelumnya.

a. IK 5: Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan

Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan merupakan nilai rata-rata kualitas pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan/akumulasi dari nilai tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan suatu pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan dibagi dengan jumlah pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan yang diperiksa.

Pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan adalah upaya pengawasan usaha dan/atau pemanfaat sumber daya oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Formula:

$$x_{riksa} = \sum_{i=1}^n \frac{(Xi + \dots + Xn)}{n}$$

Keterangan:

x_{riksa} : Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan

Xi : Nilai penyelesaian pemeriksaan terhadap komponen objek pengawasan sumber daya kelautan ke-i

n : Jumlah komponen objek pengawasan sumber daya kelautan yang diperiksa

Tabel 13 Nilai kualitas pemeriksaan setiap pelaku usaha

No.	Kegiatan	Nilai	Output
1.	Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan BKPM dan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas dan/atau Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha (pengawasan rutin perizinan berusaha berbasis risiko)
2.	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3.	Laporan hasil pengawasan kepada Direktur PSDP	20	Laporan kepatuhan, dan/atau tindak lanjut pemeriksaan pelaku usaha, dan/atau Surat Laik Operasi Terbit
Jumlah Nilai		100	

Dalam kurun waktu triwulan II 2025 capaian IKU ini berhasil dicapai dengan nilai yang baik yaitu 100, sebagaimana target triwulan yang ditetapkan. Capaian dapat diraih dengan memenuhi tahapan pemeriksaan sebagaimana dijelaskan pada tabel di atas. Berikut kami tampilkan capaian indikator kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 14 Capaian IK 5

Indikator Kinerja				Target		Realisasi		
				TW II	2025	TW II	s/d	TW II
						2025	TW II	2024
Indeks	pemeriksaan	pelaku	usaha	100	100	100	100	100
perikanan								

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja ini telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan instrumen pengawasan. Indikator kinerja ini memberikan batasan sehingga pengawasan yang merupakan tujuan utama dari organisasi ini dapat berjalan sebagaimana mestinya, tidak hanya merujuk kepada kaidah pengawasan akan tetapi tertib dalam pengadministrasian.

Analisa penyebab keberhasilan yang dilaksanakan Pangkalan PSDKP Tual agar mendapatkan capaian yang sempurna dalam memenuhi IKU dimaksud antara lain:

1. Mengumpulkan informasi pendahuluan, yang bertujuan agar meminimalisir masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan misanya lokasi unit usaha, transportasi yang akan digunakan, potensi persoalan yang timbul karena pengawasan;
2. Melakukan pemantapan terhadap peraturan yang berhubungan langsung dengan objek pengawasan, dengan internalisasi peraturan maupun kebijakan terbaru yang berkaitan dengan objek pengawasan;
3. Melakukan *sharing session* dengan instansi terkait guna menyamakan persepsi dan penguasaan kondisi terhadap objek pengawasan agar pelaksanaan pengawasan lebih professional dan bertanggungjawab;
4. Memenuhi tahapan pelaksanaan sebagaimana yang termuat dalam informasi indikator kinerja, agar pelaksanaan pengawasan terstruktur serta pengukuran kinerja dapat terlaksana;
5. Pengawasan terhadap perizinan berusaha telah memanfaatkan teknologi informasi terkini sehingga lebih transparan dan akuntabel.

Analisa kegiatan lain yang menunjang pencapaian yaitu:

1. Briefing rutin yang dilakukan sebagai upaya dalam meneruskan informasi serta teknis pengawasan maupun isu terkini di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Tual, sehingga distribusi informasi menjadi merata dan pengawasan dapat dilaksanakan dengan optimal;
2. Perencanaan dan penganggaran, kegiatan tersebut erat kaitannya dengan capaian organisasi mengingat alokasi anggaran terhadap kebutuhan pengawasan dan yang menunjang pengawasan perlu direncanakan dan ditetapkan dengan perhitungan yang sesuai.

Realisasi anggaran selama triwulan II tahun 2025 untuk mendukung IKU ini sebesar Rp 29,150,920,- atau 30,40% dari pagu sebesar Rp95,888,000 -. Pagu tersebut merupakan pagu setelah efisiensi dilaksanakan.

a.1 Pengawasan kapal penangkap ikan

Hingga triwulan II Pangkalan PSDKP Tual belum melaksanakan pengawasan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan. Pangkalan PSDKP Tual telah melakukan pelayanan dan pengawasan terhadap kesesuaian fisik dan dokumen kapal dalam rangka penerbitan SLO dan selama kurun waktu triwulan II Pangkalan PSDKP tual telah menerbitkan 4.110 SLO dan 82 SKP SLO dengan rincian sebagai berikut

Tabel 15 Rekapitulasi penerbitan SLO triwulan II per lokasi

No	Lokasi (UPT/Satuan/Wilker PSDKP)	Izin Pusat (>30 GT)			Izin Provinsi (11-30 GT)			Izin Provinsi (≤10 GT)				Jumlah Total				% Laik	Jumlah Kapal Laik Operasi	Jumlah Kapal Tidak Laik / SKP SLO
		HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO					
		D	B		D	B		D	B		D	B						
1	PANGKALAN PSDKP TUAL	113	125	125	29	29	29	1	1	1	1	143	155	155	100,00	155	-	
2	WILKER PSDKP DOBO	391	486	471	239	278	219	1	2	2		631	766	692	90,34	692	74	
3	WIKER PSDKP WARABAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	SATUAN PSDKP SORONG	176	184	184	1.514	1.567	1.567	417	422	422		2.107	2.173	2.173	100,00	2.173	-	
5	WILKER PSDKP SORONG SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	WILKER PSDKP RAJAAMPAT	24	23	23	-	-	-	-	-	-	-	24	23	23	100,00	23	-	
7	SATUAN PSDKP MERAUKE	122	159	158	303	413	413	-	-	-	-	425	572	571	99,83	571	1	
8	WILKER PSDKP ASMAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	WILKER PSDKP WANAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	SATUAN PSDKP KAIMANA	33	31	31	135	123	123	-	-	-	-	168	154	154	100,00	154	-	
11	WILKER PSDKP FAKFAK	3	3	3	55	85	85	-	-	-	-	58	88	88	100,00	88	-	
12	WILKER PSDKP WIMRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	SATUAN PSDKP MIMIKA	80	180	175	28	39	37	-	-	-	-	170	219	212	96,80	212	7	
14	SATUAN PSDKP MTB	32	27	27	10	15	15	-	-	-	-	42	42	42	100,00	42	-	
15	WILKER PSDKP KISAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	WILKER PSDKP BENJINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah		974	1.218	1.197	2.313	2.549	2.488	419	425	425		3.768	4.192	4.110	98,04	4.110	82	

Tabel 16 Rekapitulasi penerbitan SLO triwulan II per bulan

No	Bulan	Izin Pusat (>30 GT)			Izin Provinsi (11-30 GT)			Izin Provinsi (≤10 GT)			Jumlah Total			% Laik	Jumlah Kapal Laik Operasi	Jumlah Kapal Tidak Laik / SKP SLO
		HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO			
		D	B		D	B		D	B		D	B				
1	JANUARI	144	308	304	423	500	489	85	96	96	714	904	889	98,34	889	15
2	FEBRUARI	103	152	150	409	454	438	91	84	84	603	690	672	97,39	672	18
3	MARET	211	183	172	488	372	349	85	73	73	784	628	594	94,59	594	34
4	APRIL	123	154	153	351	467	463	63	80	80	537	701	696	99,29	696	5
5	MEI	206	211	208	355	386	383	50	57	57	611	654	648	99,08	648	6
6	JUNI	187	210	210	287	370	366	45	35	35	519	615	611	99,35	611	4
	JUMLAH	974	1.218	1.197	2.313	2.549	2.488	419	425	425	3.768	4.192	4.110	98,04	4.110	82



Gambar 6 Pengawasan usaha penangkapan ikan

Selain pengawasan terhadap kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan, Pangkalan PSDKP Tual juga melaksanakan pengawasan terhadap perizinan berusaha berbasis risiko subsektor penangkapan ikan. Sampai dengan triwulan II Pangkalan PSDKP Tual baru melaksanakan pengawasan terhadap 1 unit usaha subsektor penangkapan ikan sebagaimana tabel di bawah ini;

Tabel 17 Rekap pengawasan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan

No	Tanggal Pengawasan	Nama Perusahaan/Perorangan	Penanggungjawab	Lokasi	Jenis	Hasil
1	11/06/2025	PT INDUSTRI PERIKANAN NAMATOTA	Sugondo	Papua Barat	Rutin OSS	Hasil penilaian kepatuhan teknis PT. IPN pada KBLI 03111 dengan nomor kode proyek 202109-1312-0041-3211-483 sebesar 6% (kurang baik). Pada NKP tersebut belum memiliki sarana armada penangkapan ikan dan tidak ada kegiatan penangkapan ikan

a.2 Pengawasan kegiatan budidaya perikanan

Pengawasan terhadap budidaya dilaksanakan sampai dengan triwulan II Tahun 2025 kepada 3 pelaku usaha yang dilakukan secara insidental. Berikut disajikan dalam tabel:

Tabel 18 Rekap pengawasan budidaya

No	Tanggal	Nama Perusahaan/Perorangan	Pj	Lokasi	Jenis	Hasil
1	24/02/2025	PT Yellu Mutiara	Sutrisno Sukendi	Raja Ampat	Insidental	PT. Yellu Mutiara adalah PMDN dengan Skala Usaha Besar dan Tingkat Risiko Menengah Tinggi dengan persyaratan dasar perizinan berusaha berupa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPRL) dan persetujuan lingkungan. Agar dipantau proses sertifikasi PKKPRLnya (dalam proses pengurusan) Hasil penilaian kepatuhan teknis KBLI 03215 pembesaran Mollusca Laut sebesar 90 (baik sekali), melakukan kegiatan pembesaran kerang mutiara.
2	16/04/2025	POKDAKAN SIDO MUNCUL	Daud Yusuf	Sorong	Insidental	Usaha budidaya nila belum dilengkapi dengan NIB. Hasil penilaian kepatuhan teknis 75%
3	02/05/2025	PT Dafin Mutiara	Roy Means Djabumir	Tual	Insidental	Usaha pembenihan PT Dafin Mutiara (di Ohoi tahit) belum memiliki CPIB, hasil penilaian kepatuhan teknis 65,2



Gambar 7 Pengawasan budidaya

a.3 Pengawasan kegiatan pengolahan perikanan

Pengawasan terhadap UPI yang dilaksanakan hingga triwulan II tahun 2025 sebanyak 4 unit usaha dengan data sebagaimana kami jabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 19 Rekap pengawasan pengolahan ikan

No	Tanggal	Nama Perusahaan/Perorangan	Pj	Lokasi	Jenis	Hasil
1	23/04/2025	BONNI TANER	BONNI TANER	KKT	Insidental	usaha pengolahan pengeringan teripang belum dilengkapi dengan SKP, hasil penilaian kepatuhan teknis 50.
2	26/05/2025	PT DWI BINA UTAMA	Achmad Baiquni	Sorong	Rutin OSS	PT DBU telah melakukan kegiatan usaha pengolahan dan distribusi dengan baik.
3	05/06/2025	PT. PERIKANAN INDONESIA CABANG SORONG	HASMEN	Sorong	Insidental	kegiatan usaha sudah tidak aktif, ditemukan SKP yang telah habis masa berlaku, hasil penilaian kepatuhan teknis 56,5
4	30/06/2025	PT MINA BINTUNI ABADI	FREEDDY RAY SATRIO	Pomako, Timika	Rutin OSS	Perusahaan belum beroperasi karena belum siapnya sarana dan prasarana, serta kurangnya modal usaha.



Gambar 8 Pengawasan pengolahan ikan

a.4 Pengawasan kegiatan pemasaran perikanan

Pengawasan terhadap pemasaran kegiatan perikanan yang dilaksanakan hingga triwulan II tahun 2025 sebanyak 2 unit usaha dengan data sebagaimana kami jabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 20 Rekap pengawasan pemasaran ikan

No	Tanggal	Nama Perusahaan/Perorangan	Pj	Lokasi	Jenis	Hasil
1	24/04/2025	ANDA TUAL OCEAN FISHERIES	DIPA TAMTELAHITU	Tual	Rutin OSS	PT. Anda Tual Ocean Fisheries belum beroperasi karena masih menunggu TCG antara pihak Indonesia dengan China, sehingga KBLI 46206 dengan nomor kode proyek 202211-1811-5655-9093-839 belum aktif/beroperasi. Sarana dan prasarana, tenaga kerja belum ada.
2	24/04/2025	HAI ZHONG BAO	PAN, ZHONGLIN	Saumlaki	Rutin OSS	KBLI 46324 Belum melakukan kegiatan usaha, namun pada saat pengawasan hanya melakukan kegiatan pengolahan secara sederhana. Kegiatan usaha telah memenuhi persyaratan dasar usaha dan standar pelaksanaan kegiatan usaha. Nilai kepatuhan teknis pelaku usaha HAI ZHONG BAO dengan nilai 80 (baik sekali). Yang baru di lakukan adalah kegiatan KBLI 46206 perdagangan besar hasil perikanan



Gambar 9 Pengawasan pemasaran ikan

3. Sasaran Kegiatan 6: Terselenggaranya pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan

Sasaran kegiatan terselenggaranya pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan menurunkan 1 indikator kinerja utama yang ditetapkan Pangkalan PSDKP Tual yaitu "Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual". Pada tahun sebelumnya periode pengukuran pada IKU ini dilaksanakan secara tahunan dan pada tahun 2025 dilaksanakan secara triwulan.

a. IK 8: Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual

Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP adalah Jumlah persentase kegiatan Pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dapat diselesaikan dalam mendukung kesiapan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Pangkalan PSDKP Tual memiliki 2 unit Kapal Pengawas dan 11 unit speedboat pengawasan yang dirawat dengan ketentuan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP terdiri dari :

- perawatan pencegahan (preventive maintenance **50%**),
- perawatan prediktif (predictive maintenance **40 %**)
- perawatan darurat (breakdown maintenance **10%**).

Formula:

$$Xp = (50\% \cdot x_a) + (40\% \cdot x_b) + (10\% \cdot x_c)$$

Keterangan:

Xp = Persentase Perawatan Sarana

x_a = Preventive

x_b = Predictive

x_c = Darurat

Tabel 21 Capaian IK 8

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW II 2025	2025	TW II 2025	s/d TW II 2024	TW II 2024
Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	100	100	100	100	-

Pangkalan PSDKP Tual berhasil memperoleh capaian yang baik dengan melaksanakan perawatan baik preventif, prediktif, maupun darurat dengan baik dan dibuktikan realisasi atas kebutuhan perawatan serta adanya pelaporan tentang kegiatan perawatan yang dilakukan. Capaian maksimal pada IKU ini dikarenakan beberapa **analisa penyebab keberhasilan** antara lain:

1. Pelaksanaan monitoring terhadap seluruh kebutuhan dan kesiapan operasi armada baik di Pangkalan PSDKP Tual maupun yang tersebar pada satwas dan wilker serta melaksanakan upaya perawatan dengan skala prioritas dan mengatur kebutuhan penganggarnya sehingga perawatan armada dapat dijalankan secara merata;
2. Adanya evaluasi terhadap kondisi armada yang telah dilaksanakan perawatan oleh Pangkalan PSDKP Tual dan evaluasi melalui capaian kegiatan PN bersama sesditjen PSDKP. Kegiatan evaluasi secara internal akan menguatkan kegiatan perawatan dikarenakan akan berdampak pada capaian hari ops dan kinerja armada sedangkan evaluasi ditingkat sesditjen akan memacu percepatan kegiatan perawatan apabila terdapat kerusakan karena data akan disandingkan dengan seluruh UPT lingkup ditjen PSDKP.

Realisasi atas kegiatan perawatan armada sebesar Rp1.196.214.146,- atau sebesar 67,58% dari total pagu existing sebesar Rp1.770.194.000,-. **Analisa kegiatan yang menunjang** IK ini adalah perencanaan. Kegiatan perencanaan harus dilakukan dengan tepat mengingat kegiatan perawatan dapat bersifat darurat dan posisi Pangkalan PSDKP Tual yang relatif jauh dengan penyedia *spare part* dan teknisi serta kondisi kapal maupun speedboat tersebar diseluruh wilayah kerja.

4. Sasaran Kegiatan 7: Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan

Sasaran kegiatan ini merupakan sasaran kegiatan yang berorientasi kepada penguasaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan dan menurunkan 2 indikator kinerja utama, IKU tersebut antara lain:

1. Indeks penguasaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan;
2. Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan.

a. IK 9: Indeks pengenalan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan

Indeks pengenalan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (KP) merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan pengenalan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang pada UPT Pangkalan PSDKP Tual untuk pengenalan sanksi atas pelanggaran SPKP dan pelanggaran perizinan berusaha dibidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa Surat Peringatan-1 (SP1)/Paksaan Pemerintah.

Indeks Pengenalan Sanksi Administratif Bidang KP dihitung berdasarkan rumus berikut:

$$x = \left(\frac{a}{b} \right) \times 100\%$$

- x : Indeks pengenalan sanksi administratif bidang KP
- a : Jumlah pengenalan sanksi administratif bidang KP berdasarkan penetapan pertama
- b : Jumlah keseluruhan kasus pelanggaran administratif yang ditangani berdasarkan hasil ekspose

dengan kriteria indeks

PERSENTASE	NILAI INDEKS MAKS	KRITERIA INDEKS
>50%	41	Kurang
50% - 75%	71	Cukup
75% - 100%	81	Baik

Pangkalan PSDKP Tual memperoleh nilai 81 atas IK ini berdasarkan perhitungan di atas. Total pangkalan PSDKP Tual memperoleh 28 kasus perikanan non SPKP, 18 kasus kelautan dan 69 kasus SPKP, dengan perolehan denda administratif sebesar Rp823.506.240,- dengan rincian, denda administratif dari pengawasan perikanan non SPKP sebesar Rp757.535.600, pengawasan tindak lanjut Analisa SPKP sebesar Rp49.569.600 dan dari pengawasan kelautan sebesar Rp16.401.040.

Tabel 22 Capaian IK 9

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW II 2025	2025	TW II 2025	s/d TW II 2024	TW II 2024
Indeks pengenalan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	70	81	81	81	80

Analisa penyebab keberhasilan IKU dimaksud antara lain:

1. Melakukan internalisasi kepada setiap pengawas perikanan, awak kapal pengawas, maupun polsus PWP3K yang melaksanakan tugas agar profesional dalam melakukan pemeriksaan dan penetapan sanksi berdasarkan peraturan yang berlaku, internalisasi dilakukan secara internal sebagai bagian penguatan kompetensi dan sharing session;
2. Melakukan pemeriksaan secara teliti ketika melaksanakan pengawasan baik ketika kedatangan kapal, keberangkatan kapal, pengawasan perizinan berusaha maupun pemeriksaan ketika sedang melaksanakan gelar operasi.
3. Mempelajari modus-modus terkini dalam pelanggaran dibidang kelautan dan perikanan;
4. Memasang jaringan informasi eksternal yang berkontribusi sebagai laporan awal adanya pelanggaran;
5. Melaksanakan proses BAP secara efisien dan akurat.

Analisa kegiatan yang menunjang

1. Metode expose eksternal yang melibatkan berbagai pihak sehingga penetapan sanksi lebih valid dan terukur;
2. pengumpulan data pengawasan yang kredibel sehingga bukti awal dapat dikembangkan hingga adanya penetapan denda.

Realisasi anggaran yang diserap selama triwulan II terhadap kegiatan ini sebesar Rp10,535,757,- (59,26%) dari jumlah pagu setelah efisiensi sebesar Rp17,779,000,-.

Tabel 23 Rekap pengenalan sanksi administratif non SPKP

No.	Pelaku Usaha/ Perorangan				Pemeriksa		Pelanggaran		Proses Penanganan			
	Nama Kapal (GT)	Nama	Peran	Nahkoda	Unit Kerja yang Menangani	Kapal	Rincian Pelanggaran	Jenis Sanksi Administratif	Nomor Surat Penetapan Sanksi Administratif	Tanggal Surat Penetapan Sanksi Administratif	Jumlah Denda Administratif (Rp)	Tanggal Penyetoran
1	MAHATAN ARUJAYA 21 (250)	SAMUDRA MAS GRUP, PT	Pemilik	JAFAR MUADIS	Pangkalan PSDKP Tual	KP HIU MACAN 06	Melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan Kepulauan Aru WPPNRI 718 menggunakan Alat Penangkapan Ikan berupa Jaring Hela Udang Berkantong (JHUB) dengan mesh size dibawah ukuran serta tidak memasang TED (Turtle Excluder Devices) sehingga tidak memenuhi Perizinan Berusaha yang dimiliki	Denda Administratif & Paksaan Pemerintah	B.124/DJPSDKP/PW.110/II/2025 & B.349/PSDKPlan.6/PW.110/II/2025	07 Februari 2025	118.800.000	07 Februari 2025
2	KUSUMA 109 (GT. 236)	SAMUDRA MAS GRUP, PT	Pemilik	WELM HURSEPUNY	Pangkalan PSDKP Tual	KP HIU MACAN 06	Melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan Kepulauan Aru WPPNRI 718 menggunakan Alat Penangkapan Ikan berupa Jaring Hela Udang Berkantong (JHUB) dengan mesh size dibawah ukuran serta tidak memasang TED (Turtle Excluder Devices) sehingga tidak memenuhi Perizinan Berusaha yang dimiliki	Denda Administratif & Paksaan Pemerintah	B.125/DJPSDKP/PW.110/II/2025 & B.349/PSDKPlan.6/PW.110/II/2025	07 Februari 2025	112.147.200	07 Februari 2025
3	ANGELINA 66 (GT. 56)	PT. SAMUDRA SENTOSA GEMILANG	Pemilik	HUNG SENG	Pangkalan PSDKP Tual, Wilker PSDKP Dobo	-	Melakukan alih muatan/transshipment Ikan di laut ke KM. KARYA SAMUDRA (GT.169) yang tidak memenuhi perizinan berusaha (bukan mitranya)	Denda Administratif	B.146/DJPSDKP/PW.110/II/2025	13 Februari 2025	17.024.000	14 Februari 2025
4	TIRTA JAYA MANDIRI (GT. 29)	SIM ENG	Pemilik	SAMSI	Pangkalan PSDKP Tual, Wilker PSDKP Dobo	-	Melakukan alih muatan/transshipment Ikan di laut ke KM. KARYA SAMUDRA (GT.169) yang tidak memenuhi perizinan berusaha (bukan mitranya)	SP1	B.377/PSDKPlan.6/PW.110/II/2025	11 Februari 2025	-	-
5	JALA SUKSES MANDIRI (GT. 75)	PT. JALA KARYA LAUTAN ABADI	Pemilik	SUYANTO	Pangkalan PSDKP Tual, Wilker PSDKP Dobo	-	Melakukan alih muatan/transshipment Ikan di laut ke KM. KARYA SAMUDRA (GT.169) yang tidak memenuhi perizinan berusaha (bukan mitranya)	Denda Administratif	B.159/DJPSDKP/PW.110/II/2025	18 Februari 2025	38.040.000	20 Februari 2025
6	KARYA SAMUDRA (GT. 169)	YUSDI/SAMUDRA BINTANG JAYA KARIMUN, PT	Pemilik	MARTIN	Pangkalan PSDKP Tual	-	melakukan alih muatan/transshipment Ikan di laut dari Kapal Penangkap Ikan yang bukan mitranya, sehingga yang tidak memenuhi perizinan berusaha	SP1	B.550/PSDKPlan.6/PW.110/II/2025	24 Februari 2025	-	-
7	DEWI FORTUNA (GT. 59)	ANG TJIN SIONG	Pemilik	ADI	Pangkalan PSDKP Tual, Wilker PSDKP Dobo	-	Melakukan alih muatan/transshipment Ikan di laut ke KM. SSG 66 (GT.491) yang bukan mitranya, sehingga tidak memenuhi perizinan berusaha	SP1	B.760/PSDKPlan.6/PW.110/III/2025	07 Maret 2025	-	-
8	MAKMUR JAYA 8 (GT. 59)	HERRY YANTO	Pemilik	WAHYUDI	Pangkalan PSDKP Tual	-	Melakukan alih muatan/transshipment Ikan di laut ke KM. MATAHARI SUKSES 7A (GT. 298) yang bukan mitranya, sehingga tidak memenuhi perizinan berusaha	Denda Administratif	B.221/DJPSDKP/PW.110/III/2025	11 Maret 2025	12.036.000	13 Maret 2025
9	HARLANDO PRATAMA 3 (GT. 153)	MITRA JAYAMAHE NUSANTARA, PT	Pemilik	KAMTO	Pangkalan PSDKP Tual	-	Melakukan alih muatan/transshipment Ikan di laut ke KM. MATAHARI SUKSES 7A (GT. 298) yang bukan mitranya, sehingga tidak memenuhi perizinan berusaha	Denda Administratif	B.224/DJPSDKP/PW.110/III/2025	11 Maret 2025	39.474.000	13 Maret 2025
10	BINTANG SUMBER REJEKI (GT. 124)	SINAR MENTARI BAHARI, PT	Pemilik	SAKIR	Pangkalan PSDKP Tual	-	Melakukan alih muatan/transshipment Ikan di laut ke KM. MATAHARI SUKSES 7A (GT. 298) yang bukan mitranya, sehingga tidak memenuhi perizinan berusaha	Denda Administratif	B.216/DJPSDKP/PW.110/III/2025	11 Maret 2025	25.296.000	13 Maret 2025
11	LAUTAN BERLIAN (GT. 58)	ANITA	Pemilik	MUH. SAEFUL IRFAN	Pangkalan PSDKP Tual	-	Melakukan alih muatan/transshipment Ikan di laut ke KM. MATAHARI SUKSES 7A (GT. 298) yang bukan mitranya, sehingga tidak memenuhi perizinan berusaha	Denda Administratif	B.225/DJPSDKP/PW.110/III/2025	11 Maret 2025	14.964.000	13 Maret 2025
12	SINAR MENTARI - IX	DENI ASTRIANTO	Pemilik	TAUFIK RAMLI	Pangkalan PSDKP Tual	-	Melakukan alih muatan/transshipment Ikan di laut ke KM. MATAHARI	Denda Administratif	B.220/DJPSDKP/PW.110/III/2025	11 Maret 2025	19.788.000	13 Maret 2025



	(GT. 98)						SUKSES 7A (GT. 298) yang bukan mitranya, sehingga tidak memenuhi perizinan berusaha					
13	MAKMUR JAYA 98 (GT. 98)	HERRY YANTO	Pemilik	SLAMET PRIBADI	Pangkalan PSDKP Tual	-	Melakukan alih muatan/transshipment Ikan di laut ke KM. MATAHARI SUKSES 7A (GT. 298) yang bukan mitranya, sehingga tidak memenuhi perizinan berusaha	Denda Administratif	B.222/DJPSDKP/PW.110/III/2025	11 Maret 2025	19.992.000	13 Maret 2025
14	SINAR MENTARI - 8 (GT. 97)	DENI ASTRIANTO	Pemilik	YASKURI	Pangkalan PSDKP Tual	-	Melakukan alih muatan/transshipment Ikan di laut ke KM. MATAHARI SUKSES 7A (GT. 298) yang bukan mitranya, sehingga tidak memenuhi perizinan berusaha	Denda Administratif	B.219/DJPSDKP/PW.110/III/2025	11 Maret 2025	19.584.000	13 Maret 2025
15	UNION - II (GT. 97)	SINAR MENTARI BAHARI, PT	Pemilik	WAHIJUL HAKIM	Pangkalan PSDKP Tual	-	Melakukan alih muatan/transshipment Ikan di laut ke KM. MATAHARI SUKSES 7A (GT. 298) yang bukan mitranya, sehingga tidak memenuhi perizinan berusaha	Denda Administratif	B.217/DJPSDKP/PW.110/III/2025	11 Maret 2025	25.026.000	13 Maret 2025
16	FAJAR NELAYAN (GT. 150)	HERMAN SANTOSO TJAHAYA	Pemilik	SLAMET	Pangkalan PSDKP Tual	-	Melakukan alih muatan/transshipment Ikan di laut ke KM. MATAHARI SUKSES 7A (GT. 298) yang bukan mitranya, sehingga tidak memenuhi perizinan berusaha	Denda Administratif	B.223/DJPSDKP/PW.110/III/2025	11 Maret 2025	30.600.000	13 Maret 2025
17	MENTARI ANUGRAH SELATAN (GT. 82)	MENTARI ANUGRAH SELATAN, PT	Pemilik	RIKAM	Pangkalan PSDKP Tual	-	Melakukan alih muatan/transshipment Ikan di laut ke KM. MATAHARI SUKSES 7A (GT. 298) yang bukan mitranya, sehingga tidak memenuhi perizinan berusaha	Denda Administratif	.218/DJPSDKP/PW.110/III/2025	11 Maret 2025	16.728.000	13 Maret 2025
18	MATAHARI SUKSES 7A (GT. 298)	MATAHARI SUKSES ABADI, PT	Pemilik	DWI SUTARTO	Pangkalan PSDKP Tual	-	melakukan alih muatan/transshipment Ikan di laut dari Kapal Penangkap Ikan yang bukan mitranya, sehingga tidak memenuhi perizinan berusaha	SP1	B.786/PSDKPlan.6/PW.110/III/2025	10 Maret 2025	-	-
19	BAHARI ANUGERAH (GT. 166)	LAUTAN BAHARI SEJAHTERA, PT	Pemilik	TOKHARI	Pangkalan PSDKP Tual, Wilker PSDKP Dobo	-	Melakukan alih muatan/transshipment Ikan di laut ke KM. APEL MERAH 2 (GT. 298) yang bukan mitranya, sehingga tidak memenuhi perizinan berusaha	Denda Administratif	B.226/DJPSDKP/PW.110/III/2025	11 Maret 2025	33.864.000	13 Maret 2025
20	APEL MERAH 2 (GT. 298)	HARDI SUSANTO	Pemilik		Pangkalan PSDKP Tual, Wilker PSDKP Dobo	-	melakukan alih muatan/transshipment Ikan di laut dari KM. BAHARI ANUGERAH (GT. 166) yang bukan mitranya, sehingga yang tidak memenuhi perizinan berusaha	SP1	B.789/PSDKPlan.6/PW.110/III/2025	10 Maret 2025	-	-
21	JAYA UTAMA 66 (GT. 243)	AMUDRA SENTOSA GEMILANG, PT	Pemilik		Pangkalan PSDKP Tual, Satwas SDKP Merauke	-	melakukan alih muatan/transshipment Ikan di laut dari KM. VICTORY - V (GT. 46) yang bukan mitranya, sehingga yang tidak memenuhi perizinan berusaha	SP1	B.1395/PSDKPlan.6/PW.110/V/2025	08 Mei 2025	-	-
22	VICTORY - V (GT. 46)	ARNESH SAMUDRA JAYA, PT	Pemilik	SUDARMAN	Pangkalan PSDKP Tual, Satwas SDKP Merauke	-	Melakukan alih muatan/transshipment Ikan di laut ke KM. JAYA UTAMA 66 (GT. 243) yang bukan mitranya, sehingga tidak memenuhi perizinan berusaha	SP1	B.1393/PSDKPlan.6/PW.110/V/2025	08 Mei 2025	-	-
23	SURJA REDJEKI	RATNAWATI	Pemilik	NUR ZAMAN	Pangkalan PSDKP Tual	KP HIU MACAN 14	Melakukan kegiatan alih muat ikan dengan kapal pengangkut yang bukan mitranya serta tidak dilengkapi Berita Acara Alih Muat Ikan sehingga tidak memenuhi perizinan berusaha yang dimiliki	Denda Administratif	B.444/DJPSDKP/PW.470/VI/2025	03 Juni 2025	184.470.000	
24	HORISON	RAJA JAYA SELALU, PT	Pemilik		Pangkalan PSDKP Tual	-	melakukan alih muatan/transshipment Ikan di laut dari Kapal Penangkap Ikan yang bukan mitranya, sehingga tidak memenuhi perizinan berusaha	SP1	B.1638/PSDKPlan.6/PW.110/VI/2025	03 Juni 2025		
25	BERKAH SAMUDRA C	BERKAH SAMUDRA GROUP, PT	Pemilik		Pangkalan PSDKP Tual	-	melakukan alih muatan/transshipment Ikan di laut dari Kapal Penangkap Ikan yang bukan mitranya, sehingga tidak memenuhi perizinan berusaha	SP1	B.1637/PSDKPlan.6/PW.110/VI/2025	03 Juni 2025		
26	BERKAH BERLIAN	PUTRA MINA BERLIAN, PT	Pemilik		Pangkalan PSDKP Tual	-	melakukan alih muatan/transshipment Ikan di laut dari Kapal Penangkap Ikan yang bukan mitranya, sehingga tidak memenuhi perizinan berusaha	SP1	B.1636/PSDKPlan.6/PW.110/VI/2025	03 Juni 2025		



27	BINTANG CAHAYA TERANG	FORTUN BERKAH SAMUDRA, PT		SUKARDI	Pangkalan PSDKP Tual, Wilker PSDKP Dobo	-	Melakukan kegiatan alih muat (<i>transhipment</i>) ikan dengan kapal pengangkut yang bukan mitranya sehingga tidak memenuhi perizinan berusaha yang dimiliki	Denda Administratif	B.522/DJPSDKP/PW.470/VII/2025	08 Juli 2025	29.702.400	
28	BERKAH MELIMPAH - II	BERKAH MELIMPAH JAYA, PT			Pangkalan PSDKP Tual, Wilker PSDKP Dobo	-	melakukan alih muatan/transhipment Ikan di laut dari Kapal Penangkap Ikan yang bukan mitranya, sehingga tidak memenuhi perizinan berusaha	SP1	B.1958/PSDKPlan.6/PW.110/VII/2025	07 Juli 2025		
TOTAL											757.535.600	

Tabel 24 Rekap denda administratif hasil analisis SPKP

No.	Nama Kapal (GT)	Pelaku Usaha/ Perorangan			Pemeriksa		Pelanggaran			Proses Penanganan				
		Nama	Peran	Nahkoda	Unit Kerja yang Menangani	Kapal	Rincian Pelanggaran	Pasal yang disangkakan	Jenis Sanksi Administratif	Nomor Surat Penetapan Sanksi Administratif	Tanggal Surat Penetapan Sanksi Administratif	Jumlah Denda Administratif (Rp)	Kode Billing	Tanggal Penyetoran
1	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	REZEKI ABADI (GT. 79)	REJEKI SAMUDERA MAKMUR, PT	Pemilik	SUANDI	Pangkalan PSDKP Tual, Wilker PSDKP Dobo	-	Melakukan kegiatan penangkapan di jalur penangkapan ikan II sekitar Pulau Dolak Laut Arafuru WPPNRI 718 yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha yang dimiliki	Pasal 27 angka 7 (Pasal 27A ayat (1)) UU Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 317 ayat (1) huruf g Jo Pasal 320 ayat (3) huruf g PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Denda Administratif	B.92/DJPSDKP/PW.340/I/2025	31 Januari 2025	29.577.600	820250205502606	05 Februari 2025
2	KM. BAHARI INDAH VI	SOFIAN	Pemilik	KIE	Pangkalan PSDKP Tual, Wilker PSDKP Dobo	-	Melakukan alih muatan/transhipment Ikan di laut ke KM Mitra Prima Samudera yang bukan mitranya dan tidak dilengkapi BA Alih Muat/Transhipment sehingga tidak memenuhi perizinan berusaha yang dimiliki	Pasal 27 angka 7 (Pasal 27A ayat (1)) UU Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 317 ayat (1) huruf g Jo Pasal 320 ayat (3) huruf g PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Denda Administratif	B.294/DJPSDKP/PW.470/IV/2025	23 April 2025	19.992.000	820250424642914	25 April 2025
TOTAL												49.569.600		



Tabel 25 Rekap pengenalan sanksi administratif SPKP

No	Tanggal	Nomor	Objek Pelaporan	Pelanggaran
1	21/01/2025	B.181/PSDKPLan.6/PW.110/I/2025	Kapal Indonesia PUTRA KENCANA - VIII NO Buku Kapal 2572	Beroperasi Dekat Garis Pantai
2	06/02/2025	B.331/PSDKPLan.6/PW.110/II/2025	Kapal Indonesia HASIL MELIMPAH-I NO Buku Kapal 2092	Pelanggaran DPI
3	06/02/2025	B.330/PSDKPLan.6/PW.110/II/2025	Kapal Indonesia PAHALA MELIMPAH 1 NO Buku Kapal 10226	Pelanggaran DPI
4	13/02/2025	B.399/PSDKPLan.6/PW.110/II/2025	Kapal Indonesia SUMBER BERKAH NO Buku Kapal 6773	Pelanggaran DPI
5	13/02/2025	B.400/PSDKPLan.6/PW.110/II/2025	Kapal Indonesia PAHALA MELIMPAH 8 NO Buku Kapal 10364	Pelanggaran DPI
6	13/02/2025	B.396/PSDKPLan.6/PW.110/II/2025	Kapal Indonesia HASIL MELIMPAH - 5 NO Buku Kapal 8063	Pelanggaran DPI
7	14/02/2025	B.444/PSDKPLan.6/PW.110/II/2025	Kapal Indonesia VICTORY - V NO Buku Kapal 7558	Beroperasi Dekat Garis Pantai
8	14/02/2025	B.445/PSDKPLan.6/PW.110/II/2025	Kapal Indonesia MARIS - III NO Buku Kapal 7553	Beroperasi Dekat Garis Pantai
9	19/02/2025	B.499/PSDKPLan.6/PW.110/II/2025	Kapal Indonesia PUTRA BAHARI PRATAMA - 121 NO Buku Kapal 5126	Pelanggaran DPI
10	19/02/2025	B.504/PSDKPLan.6/PW.110/II/2025	Kapal Indonesia TIEN SUDARMO - 01 NO Buku Kapal 8359	Beroperasi Dekat Garis Pantai
11	21/02/2025	B.541/PSDKPLan.6/PW.110/II/2025	Kapal Indonesia DYNASTI MAKMUR - IA NO Buku Kapal 2573	Pelanggaran DPI
12	24/02/2025	B.551/PSDKPLan.6/PW.110/II/2025	Kapal Indonesia HASIL ANUGRAH MINA NO Buku Kapal 8199	Pelanggaran DPI
13	24/02/2025	B.553/PSDKPLan.6/PW.110/II/2025	Kapal Indonesia MARCEL JAYA 57 NO Buku Kapal 7088	Pelanggaran DPI
14	24/02/2025	B.559/PSDKPLan.6/PW.110/II/2025	Kapal Indonesia KARYA BAHARI SEJAHTERA NO Buku Kapal 10607	Masuk Zona Konservasi
15	24/02/2025	B.560/PSDKPLan.6/PW.110/II/2025	Kapal Indonesia JASA MINA PERSADA NO Buku Kapal 914	Beroperasi Dekat Garis Pantai
16	26/02/2025	B.608/PSDKPLan.6/PW.110/II/2025	Kapal Indonesia BAHARI INDAH - VI NO Buku Kapal 7533	Pelanggaran DPI
17	26/02/2025	B.609/PSDKPLan.6/PW.110/II/2025	Kapal Indonesia PERINTIS JAYA - VII NO Buku Kapal 1723	Pelanggaran DPI
18	26/02/2025	B.610/PSDKPLan.6/PW.110/II/2025	Kapal Indonesia PERINTIS JAYA - 85 NO Buku Kapal 5316	Pelanggaran DPI
19	26/02/2025	B.611/PSDKPLan.6/PW.110/II/2025	Kapal Indonesia AGUNG MAKMUR - 168 NO Buku Kapal 5128	Pelanggaran DPI
20	27/02/2025	B.631/PSDKPLan.6/PW.110/II/2025	Kapal Indonesia SUMBER JAYA - 28 NO Buku Kapal 2734	Pelanggaran DPI
21	27/02/2025	B.632/PSDKPLan.6/PW.110/II/2025	Kapal Indonesia DUTA BAHARI - III NO Buku Kapal 7654	Pelanggaran Pelabuhan
22	05/03/2025	B.729/PSDKPLan.6/PW.110/III/2025	Kapal Indonesia GARUDA MILLENNIUM NO Buku Kapal 2127	Beroperasi Dekat Garis Pantai
23	05/03/2025	B.729/PSDKPLan.6/PW.110/III/2025	Kapal Indonesia GARUDA MILLENNIUM NO Buku Kapal 2127	Pelanggaran DPI
24	03/03/2025	B.691/PSDKPLan.6/PW.110/III/2025	Kapal Indonesia MINA UTAMA NO Buku Kapal 1901	Pelanggaran DPI
25	05/03/2025	B.732/PSDKPLan.6/PW.110/III/2025	Kapal Indonesia KARYA INDAH 308 NO Buku Kapal 16968	Pelanggaran DPI
26	06/03/2025	B.750/PSDKPLan.6/PW.110/III/2025	Kapal Indonesia STARINDO PRIMA NO Buku Kapal 19640	Pelanggaran DPI
27	13/03/2025	B.843/PSDKPLan.6/PW.110/III/2025	Kapal Indonesia WITA MAKMUR 3 NO Buku Kapal 10283	Pelanggaran DPI
28	13/03/2025	B.836/PSDKPLan.6/PW.110/III/2025	Kapal Indonesia PHOTERI NO Buku Kapal 3591	Pelanggaran DPI
29	13/03/2025	B.837/PSDKPLan.6/PW.110/III/2025	Kapal Indonesia VICTORY BARU NO Buku Kapal 3997	Pelanggaran DPI
30	13/03/2025	B.838/PSDKPLan.6/PW.110/III/2025	Kapal Indonesia WITA MAKMUR I NO Buku Kapal 9851	Pelanggaran DPI
31	13/03/2025	B.838/PSDKPLan.6/PW.110/III/2025	Kapal Indonesia HARAPAN JAYA MAJU NO Buku Kapal 1720	Pelanggaran DPI
32	13/03/2025	B.839/PSDKPLan.6/PW.110/III/2025	Kapal Indonesia ADI JAYA 04 NO Buku Kapal 7765	Beroperasi Dekat Garis Pantai
33	17/03/2025	B.867/PSDKPLan.6/PW.110/III/2025	Kapal Indonesia MUARA INDAH - 3 NO Buku Kapal 6026	Pelanggaran DPI
34	17/03/2025	B.868/PSDKPLan.6/PW.110/III/2025	Kapal Indonesia DINASTI MAKMUR - 03 NO Buku Kapal 6347	Beroperasi Dekat Garis Pantai
35	17/03/2025	B.875/PSDKPLan.6/PW.110/III/2025	Kapal Indonesia AL BARQAH 03 NO Buku Kapal 11126	Pelanggaran Pelabuhan
36	17/03/2025	B.877/PSDKPLan.6/PW.110/III/2025	Kapal Indonesia JAYA MULIA NO Buku Kapal 4739	Pelanggaran DPI
37	17/03/2025	B.878/PSDKPLan.6/PW.110/III/2025	Kapal Indonesia SUMBER NELAYAN 87 NO Buku Kapal 7481	Pelanggaran DPI
38	17/03/2025	B.876/PSDKPLan.6/PW.110/III/2025	Kapal Indonesia DINASTI KARIMUN 18 NO Buku Kapal 7332	Pelanggaran DPI
39	21/03/2025	B.928/PSDKPLan.6/PW.110/III/2025	Kapal Indonesia TEGUH MULYA NO Buku Kapal 9823	Pelanggaran Pelabuhan
40	27/03/2025	B.977/PSDKPLan.6/PW.110/III/2025	Kapal Indonesia PANCA EMAS NO Buku Kapal 1225	Beroperasi Dekat Garis Pantai
41	27/03/2025	B.978/PSDKPLan.6/PW.110/III/2025	Kapal Indonesia SUMBER NELAYAN 268 NO Buku Kapal 10695	Pelanggaran DPI
42	27/03/2025	B.979/PSDKPLan.6/PW.110/III/2025	Kapal Indonesia SOYO MANDIRI NEW 01 NO Buku Kapal 12080	Beroperasi Dekat Garis Pantai
43	27/03/2025	B.980/PSDKPLan.6/PW.110/III/2025	Kapal Indonesia DINASTI MAKMUR NO Buku Kapal 9593	Pelanggaran DPI
44	17/04/2025	B.1115/PSDKPLan.6/PW.110/IV/2025	Kapal Indonesia MINA HARAPAN JAYA NO Buku Kapal 4289	Pelanggaran DPI
45	17/04/2025	B.1102/PSDKPLan.6/PW.110/IV/2025	Kapal Indonesia BINTANG INDAH NO Buku Kapal 2674	Beroperasi Dekat Garis Pantai
46	17/04/2025	B.1119/PSDKPLan.6/PW.110/IV/2025	Kapal Indonesia STAR DOLPHIN NO Buku Kapal 1177	Pelanggaran DPI
47	17/04/2025	B.1120/PSDKPLan.6/PW.110/IV/2025	Kapal Indonesia MINA SAMUDERA-03 NO Buku Kapal 10953	Pelanggaran Pelabuhan
48	23/04/2025	B.1165/PSDKPLan.6/PW.110/IV/2025	Kapal Indonesia HASIL ANUGRAH MINA NO Buku Kapal 8199	Pelanggaran DPI
49	24/04/2025	B.1187/PSDKPLan.6/PW.110/IV/2025	Kapal Indonesia CAHAYA REJEKI NO Buku Kapal 8107	Pelanggaran Pelabuhan
50	28/04/2025	B.1228/PSDKPLan.6/PW.110/IV/2025	Kapal Indonesia BERKAH MINA BAROKAH NO Buku Kapal 10229	Beroperasi Dekat Garis Pantai
51	29/04/2025	B.1247/PSDKPLan.6/PW.110/IV/2025	Kapal Indonesia SINAR CAKRA BUANA 06 NO Buku Kapal 12751	Beroperasi Dekat Garis Pantai
52	30/04/2025	B.1275/PSDKPLan.6/PW.110/IV/2025	Kapal Indonesia IMMANUEL ME NO Buku Kapal 6351	Beroperasi Dekat Garis Pantai
53	02/05/2025	B.1294/PSDKPLan.6/PW.110/V/2025	Kapal Indonesia MAKMUR MANDIRI NO Buku Kapal 10152	Beroperasi Dekat Garis Pantai
54	02/05/2025	B.1295/PSDKPLan.6/PW.110/V/2025	Kapal Indonesia NALENDRA MINA WIJAYA NO Buku Kapal 13836	Beroperasi Dekat Garis Pantai
55	05/05/2025	B.1345/PSDKPLan.6/PW.110/V/2025	Kapal Indonesia MAS BERLIAN NO Buku Kapal 14731	Pelanggaran Pelabuhan
56	06/05/2025	B.1352/PSDKPLan.6/PW.110/V/2025	Kapal Indonesia POLLY 15 NO Buku Kapal 12035	Beroperasi Dekat Garis Pantai
57	13/03/2025	B.793/PSDKPLan.3/PW.320/III/2025	Kapal Indonesia MITRA PRIMA SAMUDERA I NO Buku Kapal 10547	Alih Muat antar Kapal

58	06/05/2025	B.1355/PSDKPLan.6/PW.110/V/2025	Kapal Indonesia TSM 77 NO Buku Kapal 10570	Masuk Zona Konservasi
59	09/05/2025	B.1409/PSDKPLan.6/PW.110/V/2025	Kapal Indonesia ISSO PUTRI 02 NO Buku Kapal 10713	Masuk Zona Konservasi
60	09/05/2025	B.1416/PSDKPLan.6/PW.110/V/2025	Kapal Indonesia VICTORY - III NO Buku Kapal 7559	Masuk Zona Konservasi
61	14/05/2025	B.1431/PSDKPLan.6/PW.110/V/2025	Kapal Indonesia MARIS - II NO Buku Kapal 7554	Beroperasi Dekat Garis Pantai
62	14/05/2025	B.1432/PSDKPLan.6/PW.110/V/2025	Kapal Indonesia MARGANA SAKTI - II NO Buku Kapal 1207	Masuk Zona Konservasi
63	27/02/2025	B.632/PSDKPLan.6/PW.110/II/2025	Kapal Indonesia DUTA BAHARI - III NO Buku Kapal 7654	Beroperasi Dekat Garis Pantai
64	19/02/2025	B.506/PSDKPLan.6/PW.110/II/2025	Kapal Indonesia PRIMA UTAMA JAYA - I NO Buku Kapal 8306	Beroperasi Dekat Garis Pantai
65	14/05/2025	B.1433/PSDKPLan.6/PW.110/V/2025	Kapal Indonesia TROPIKA JAYA NO Buku Kapal 1209	Masuk Zona Konservasi
66	22/05/2025	B.1504/PSDKPLan.6/PW.110/V/2025	Kapal Indonesia BINTANG BAHAGIA 8 NO Buku Kapal 6067	Masuk Zona Konservasi
67	19/06/2025	B.1796/PSDKPLan.6/PW.110/VI/2025	Kapal Indonesia PUTRI DUYUNG CS NO Buku Kapal 7105	Beroperasi Dekat Garis Pantai
68	19/06/2025	B.1797/PSDKPLan.6/PW.110/VI/2025	Kapal Indonesia NICO - III NO Buku Kapal 9201	Beroperasi Dekat Garis Pantai
69	24/06/2025	B.1844/PSDKPLan.6/PW.110/VI/2025	Kapal Indonesia INDO LAUTAN SAKTI - 8 NO Buku Kapal 3887	Beroperasi Dekat Garis Pantai

Tabel 26 Rekap sanksi administratif bidang kelautan

NO	NAMA KAPAL/PERUSAHAAN	PELANGGARAN	SANKSI ADMINISTRATIF	NILAI DENDA
1	PT. KLASAMAN INDAH RAYA	Pemanfaatan ruang laut seluas 0,878 Ha tanpa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL)	Denda	Rp16.401.040
2	PT INDUSTRI PERIKANAN ARAFURA	Melakukan pelanggaran berupa tindakan tidak menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan	SP1	
3	PT SAMUDERA INDO SEJAHTERA		SP1	
4	PT BAGUS JAYA ABADI		SP1	
5	PT RAJAWALI LAUT TIMUR		SP1	
6	PT PERTAMINA PATRA NIAGA		SP1	
7	PT SUMA SARANA		SP1	
8	PT PAPUA RESORT		SP1	
9	JULIO FRANCO SUTRISNO		SP1	
10	PT AMERA NUS		SP1	
11	PT PERTAMINA PATRA NIAGA		SP1	
12	PT AMERA NUS		SP1	
13	PT KAWEI SEJAHTERA MINING		SP1	
14	PT RAJAWALI LAUT TIMUR		SP1	
15	PT GOLDEN EKSPORINDO ABADI		SP1	
16	PT ARABIKATAMA KHATULISTIWA FISHING INDUSTRY		SP1	
17	PT LAYAR NUSANTARA GAS		SP1	
18	PT LAYAR NUSANTARA GAS		SP1	
		TOTAL		Rp16.401.040



Gambar 10 Ekspose penetapan sanksi administratif

b. IK 10: Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan

Indeks tindak lanjut hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan kinerja dalam melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap indikasi dugaan pelanggaran dari analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan.

Formula :

$$X_{TLH} = \Sigma \frac{(X_1+X_2+X_n)}{n} \times 100\%$$

x_{TLH} : Indeks tindak lanjut hasil analisis pemantauan SDKP;

x_{1+2+n} : Jumlah pelanggaran yang dilakukan tindak lanjut pengenaan sanksi administratif (SP1, SP2, dan denda administratif) dan bukan pelanggaran

n : Jumlah hasil analisis SPKP yang telah dilakukan pemeriksaan lanjutan

dengan kriteria indeks

PERSENTASE	NILAI INDEKS MAKS	KRITERIA INDEKS
>50%	41	Kurang
50% - 75%	71	Cukup
75% - 100%	81	Baik

Hingga triwulan II tahun 2025 Pangkalan PSDKP Tual telah melakukan pemeriksaan terhadap 177 dugaan pelanggaran SPKP menurut data pemantauan yang dilakukan oleh tim pusdal. Data dugaan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Pangkalan PSDKP Tual dengan melakukan pemeriksaan terhadap nakhoda maupun pemilik. Berikut hasil tindak lanjut tersebut kami sampaikan dalam bentuk tabel.

Tabel 27 Rekapitulasi SPKP

NO	UPT	HASIL ANALISIS PUSDAL (INDIKASI PELANGGARAN)						ANALISIS LANJUTAN		TINDAK LANJUT						CAPAIAN IKU PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF			
		TRANSSHIPMENT	PELABUHAN PANGKALAN	DPI	JALUR (<12 NM)	ZONA KONSERVASI	JUMLAH	DALAM PROSES	SUDAH	SURAT PEMANGGILAN	BUKAN PELANGGARAN	BAP	SP1	SP2	DENDA	CAPAIAN KOMPONEN SPKP	CAPAIAN KOMPONEN SELAIN SPKP	RATA-RATA	Kriteria indeks (melihat tabel)
1	Tual	7	18	72	68	12	177	68	109	51	13	3	40	1	1	100%	100%	100%	81
Total		7	18	72	68	12	177	68	109	51	13	3	40	1	1				

$$X_{TLH} = \Sigma \frac{(X1+X2+Xn)}{n} \times 100\% = \frac{(40+1+1+13)}{109-51-3} \times 100\% = \frac{55}{55} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel di atas maka Pangkalan PSDKP tual memperoleh capaian triwulan II sebesar 81 dari target triwulan II yang ditetapkan sebesar 70. Berikut kami sampaikan data capaian indikator kinerja dimaksud dalam bentuk tabel.

Tabel 28 Capaian IK 10

Indikator Kinerja				Target		Realisasi		
				TW II	2025	TW II 2025	s/d TW II	TW II 2024
Indeks	Pemeriksaan	Hasil	Analisis	70	81	81	81	80
Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan								

Analisis penyebab keberhasilan disebabkan antara lain:

1. Pangkalan PSDKP Tual menindaklanjuti dengan melaksanakan BAP kepada pelaku usaha yang terindikasi melakukan pelanggaran dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu;
2. Pangkalan PSDKP Tual memanfaatkan aplikasi online dalam hal ini zoom meeting agar mempermudah proses permintaan keterangan terhadap pemilik yang berdomisili di luar wilayah kerja Pangkalan PSDKP Tual.

Analisa kegiatan yang menunjang tercapainya indikator kinerja dimaksud adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan tindaklanjut kapal yang diindikasi melakukan pelanggaran. Pangkalan PSDKP Tual secara kontinu (mingguan) terus melakukan pemanggilan klarifikasi maupun berkoordinasi kepada UPT PSDKP lainnya agar proses permintaan keterangan dapat berjalan dengan lancar.

5. Sasaran kinerja 8: Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan

Sasaran kinerja ini menghasilkan satu indikator kinerja utama yaitu "Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan" indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang telah digunakan tahun sebelumnya untuk mengukur capaian kinerja pada kegiatan tindak pidana kelautan dan perikanan akan tetapi pada tahun ini perhitungan akan dilaksanakan setiap triwulan.

a. IK 11: Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan

Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dapat dikategorikan selesai apabila berkas telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P21), serta barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke JPU (Penyerahan Tahap II).

$$\text{Indeks Penyelesaian Penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan}(xa) = \left(\frac{a}{\sum b} \right)$$

- X_a : Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
- a : Jumlah kasus ditahun berjalan yang telah selesai ditangani dari terbitnya surat perintah penyidikan sampai dengan selesai (P-21 dan / atau penyerahan tahap II ke Jaksa Penuntut Umum atau Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP-3), dikecualikan kasus kategori sulit ataupun diatasnya, kasus bisa dihitung capaian selama 2 bulan dari proses SPRINDIK terbit
- n : Total kasus penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan ditahun berjalan

Sampai dengan triwulan II tahun 2025 Pangkalan PSDKP Tual belum menangani kasus TPKP dikarenakan indikator kinerja ini bersifat kasuistik. Kondisi ini secara otomatis membuat capaian akan sama dengan target yang telah ditetapkan pada triwulan II tahun 2025 yaitu sebesar 70.

6. Sasaran kinerja 9: Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Sasaran kinerja ini menurunkan 10 indikator kinerja manajerial yang telah ditetapkan Pangkalan PSDKP Tual dalam perjanjian kinerja Tahun 2025. 10 indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja yang melekat pada kegiatan penatausahaan dan merupakan kerja administrasi keseharian diantaranya;

1. Nilai kinerja perencanaan anggaran satker Pangkalan PSDKP Tual (nilai);
2. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satker lingkup Pangkalan PSDKP Tual (nilai);
3. Indeks profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Tual (indeks);
4. Penilaian mandiri SAKIP satker Pangkalan PSDKP Tual (nilai);
5. Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko Pangkalan PSDKP Tual (%);
6. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%);
7. Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual (nilai);
8. Nilai pengawasan kearsipan internal Pangkalan PSDKP Tual (nilai);
9. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Tual (inovasi);
10. Nilai implementasi program budaya kerja (nilai).

Selama kurun waktu triwulan II Pangkalan PSDKP Tual melakukan penilaian terhadap 5 indikator kinerja manajerial yang dinilai secara triwulan yaitu pada point 2, 3, 5, 6, dan 7 sedangkan realisasi seluruh kegiatan dukungan manajemen selama triwulan II sebesar Rp9,196,608,759,- atau sekitar 57,50% dari total pagu Rp19,982,733,000,-

a. IK 13: Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satker lingkup Pangkalan PSDKP Tual (nilai)

IKPA merupakan Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. IKPA dapat diformulasikan sebagai berikut

$$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$$

- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Perhitungan terhadap capaian IKPA dapat langsung dilihat pada aplikasi berbasis web yaitu <https://spanint.kemenkeu.go.id/> dengan memilih menu MONEV PA.

Tabel 29 Uraian indikator IKPA

No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi RPD	15
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)
8	Capaian Output	25

Tabel 30 Capaian IKPA Pangkalan PSDKP Tual

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	084	032	440853	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL	Nilai	100.00	93.30	100.00	100.00	100.00	88.81	100.00	97.88	100%	0.00	97.88
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.00	20.00	10.00	10.00	8.88	25.00				
					Nilai Aspek	96.65			97.20			100.00				

Sumber: <https://spanint.kemenkeu.go.id/>

Tabel 31 Capaian IK 13

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW II	2025	TW II 2025	s/d TW II	TW II 2024
Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satker lingkup Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	72	92	97,88	97,88	86,53

Pengukuran capaian IKPA dilaksanakan pada triwulan II dan tahunan. Pangkalan PSDKP Tual berhasil memperoleh capaian maksimal dari target yang ditetapkan. Tabel capaian IKPA Pangkalan PSDKP Tual telah menyajikan hasil capaian dengan menjabarkan seluruh indikator. Terdapat 2 indikator dengan nilai tidak maksimal walaupun masih dalam kategori baik yaitu deviasi halaman III DIPA dan pengelolaan UP/TUP.

Analisa penyebab keberhasilan kegiatan ini antara lain:

1. Revisi DIPA dilaksanakan dengan mematuhi kaidah maupun ketentuan yang ditetapkan Kementerian keuangan melalui DJA;
2. Pencatatan capaian output yang dilaksanakan rutin secara berkala yang merupakan korelasi antara capaian kinerja dan anggaran;
3. Kegiatan kontraktual pada Pangkalan PSDKP Tual telah dilaksanakan dengan baik;
4. Pendistribusian atas pencatatan keuangan telah dilaksanakan disetiap level sehingga penyelesaian tagihan dilaksanakan dengan terukur.

Terdapat beberapa alasan sehingga terdapat 2 indikator yang konversi bobotnya tidak maksimal antara lain;

1. Pengelolaan UP/TUP yang belum optimal dikarenakan terdapat keterlambatan dalam revolving GUP ataupun PTUP sehingga mengakibatkan konversi bobot di bawah 100%;
2. Deviasi halaman III DIPA, realisasi tidak bergerak sejalan dengan rencana penarikan dana (RPD) dikarenakan terdapat efisiensi pada sebagian besar mata anggaran Pangkalan PSDKP Tual dan terdapat anggaran yang bersumber dari PNBPN yang belum dapat digunakan sehingga mengakibatkan disparitas yang lebih dari 5% dari setiap jenis belanja pada setiap kegiatan.

Analisa kegiatan yang menunjang antara lain:

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan keuangan baik realisasi maupun seluruh indikator dalam penilaian IKPA;
2. SDM keuangan yang telah memadai dan tersertifikasi dengan BNT maupun sertifikat keahlian yang lain maupun internalisasi terhadap semua aspek yang berhubungan dengan pembelanjaan anggaran negara.

b. IK 14: Indeks profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Tual (indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Pangkalan PSDKP Tual memperoleh nilai 80,83 dari target 77 pada triwulan II tahun 2025 sebagaimana surat Sesditjen PSDKP No. B.2324/DJPSDKP.1/KP.720/VII/2025 tanggal 15 Juli 2025 (lampiran II). Manfaat dari dilaksanakannya penilaian IP ASN adalah untuk menilai **kualitas, kompetensi, integritas, dan kinerja ASN** dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Berikut capaian kami sajikan dalam tabel

Tabel 32 Capaian IK 14

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW II	2025	TW II 2025	s/d TW II	TW II 2024
Indeks profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Tual (indeks)	77	81	80,83	80,83	83,09

Analisa penyebab keberhasilan kegiatan ini antara lain:

1. Keterlibatan pimpinan dalam monitoring capaian IP ASN, dengan melakukan pemantauan capaian per pegawai melalui WAG;
2. Distribusi informasi terkait kegiatan diklat yang dapat diikuti ASN baik secara luring maupun daring;
3. Kesadaran ASN dalam melakukan upgrade terhadap kemampuan dalam melaksanakan tugas.

Analisa kegiatan yang menunjang Adalah pelaksanaan kegiatan bimtek maupun diklat yang dilaksanakan baik secara internal KKP maupun oleh lembaga eksternal.

c. **IK 15: Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Pangkalan PSDKP Tual (%)**

Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.

Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.

Formula:

$$X = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Keterangan:

X = Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko

a = Jumlah Form Pemantauan Manajemen Risiko

b = Jumlah Form Identifikasi Manajemen Risiko

Pangkalan PSDKP Tual telah melakukan pengendalian risiko dan dipantau oleh tim sesdit terkait kelengkapan data dukung dan tahapan pengendalian. Capaian yang diperoleh Pangkalan PSDKP Tual **sebesar 100 dari target 100 pada triwulan II tahun 2025** dengan merealisasikan 13 pengendalian risiko dari 13 rencana, dengan perhitungan sebagai berikut

$$X = \frac{13}{13} \times 100\% = 100\%$$

Pencapaian ini dikarenakan seluruh kemungkinan risiko pada setiap tim kerja pada Pangkalan PSDKP Tual telah diidentifikasi, didokumentasikan serta telah diverifikasi dan dinilai sebagaimana surat Sesditjen PSDKP No. B.2332/PSDKP.1/OT.710/VII/2025 tanggal 15 Juli 2025 (lampiran III). Capaian indikator kinerja ini kami sajikan dalam tabel berikut.

Tabel 33 Capaian IK 16

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW II 2025	2025	TW II 2025	s/d TW II 2024	TW II 2024
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Pangkalan PSDKP Tual (%)	100	100	100	100	100

Analisa penyebab keberhasilan kegiatan ini antara lain:

1. Setiap tim kerja mengidentifikasi setiap skala risiko yang kemungkinan bisa terjadi dalam rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam triwulan berjalan dan dituangkan dalam form kendali yang mendapat perhatian dan arah pimpinan;
2. Menentukan langkah pencegahan yang dilakukan untuk meminimalisir risiko tersebut;

3. Menyusun risiko dan pencegahan dalam sebuah matriks yang telah disahkan oleh setiap tim kerja.

Analisa kegiatan yang menunjang keberhasilan adalah evaluasi, kegiatan organisasi berjalan seirama sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan sebagai acuan kerja. Kegiatan yang sama akan berjalan terus sehingga peran evaluasi akan memberikan gambaran terhadap rencana dan pencegahan kedepan atas dasar evaluasi kegiatan sebelumnya.

d. IK 16: Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan

Jumlah rekomendasi **hasil pengawasan Itjen** yang telah ditindaklanjuti **secara tuntas** (status tindak lanjut adalah **TUNTAS**) oleh Unit Kerja Level 2. Data capaian berdasarkan Nota Dinas Capaian dari Inspektorat Jenderal. Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah ditindaklanjuti **secara tuntas** (status tindak lanjut adalah **TUNTAS**) sebanyak **75%** dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran.

$$\text{Jml Rekomendasi} = \frac{(\sum N_t)}{(\sum N)} \times 100\%$$

Keterangan:

$\sum N_t$ = Rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Level 2

$\sum N$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang diberikan kepada Unit Kerja Level 2

Tabel 34 Capaian IK 17

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW II	2025	TW II 2025	s/d TW II	TW II 2024
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95%	95%	100%	100%	80%

Selama triwulan II tahun 2025 Pangkalan PSDKP Tual telah menyelesaikan 12 tindak lanjut atas 12 rekomendasi yang disampaikan itjen sebagaimana tertuang dalam surat Sesditjen PSDKP Nomor B.2306/DJPSDKP.1/TU.140/VII/2025 tanggal 10 Juli 2025 (lampiran IV), dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Rekomendasi} = \frac{12}{12} \times 100\% = 100\%$$

Analisa penyebab keberhasilan yang mendukung capaian ini adalah mendelegasikan pihak yang bertanggung jawab jika terdapat rekomendasi untuk ditindaklanjuti, serta pimpinan yang proaktif untuk memantau sejauh mana progress tindak lanjut sudah diselesaikan.

Analisa kegiatan yang menunjang adalah kegiatan monitoring internal setelah rekomendasi disampaikan, yang dipimpin langsung oleh kasubag umum agar tindak lanjut dapat segera disampaikan.

e. IK 17: Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual (nilai)

Nilai Kepuasan Masyarakat adalah data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran melalui survei secara kuantitatif dan komprehensif terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pengambilan Survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017. Survei digunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selain itu hasil survei dipergunakan untuk bahan kebijakan terhadap pelayanan publik dan melihat kecenderungan (*trend*) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada Masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Pelaksanaan Survei dilakukan setiap triwulan oleh seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Ditjen PSDKP menggunakan aplikasi SI SUSAN (Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat KP). Penentuan nilai ditetapkan setelah dilakukan verifikasi dan validasi level eselon I yang dilaksanakan 8 s.d 10 hari di triwulan berikutnya.

Nilai mutu pelayanan diukur melalui sistem informasi survei kepuasan Masyarakat (*tools* SKM atau SI-SUSAN) atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KKP sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2021. Penilaian dilakukan atas seluruh responden KKP mencakup 9 unsur pelayanan antara lain U1-Persyaratan Layanan⁽¹⁾, U2-Kemudahan Prosedur⁽²⁾, U3-Waktu Penyelesaian⁽³⁾, U4-Kesesuaian Biaya⁽⁴⁾, U5-Kesesuaian Produk⁽⁵⁾, U6-Kecepatan Respon/Kompetensi Petugas⁽⁶⁾, U7-Kemudahan Fitur/Perilaku Petugas⁽⁷⁾, U8-Layanan Konsultasi⁽⁸⁾, dan U9-Kualitas Isi/Sarana⁽⁹⁾.

SLO (Standar Laik Operasi) Kapal Perikanan merupakan kegiatan pelayanan publik yang ada di Lingkup Pangkalan PSDKP Tual. Survei kepuasan masyarakat dilakukan kepada 65 pengguna jasa di Pangkalan PSDKP Tual termasuk satwas dan wilker selama kurun waktu

triwulan II dan diperoleh nilai 99,19 dari target 88,5 sebagaimana tertuang dalam surat Sesditjen PSDKP No. B.2286/DJPSDKP.1/HP.430/VII/2025 tanggal 9 Juli 2025 (lampiran V). Berikut kami sampaikan tabel capaian perhitungan indikator kinerja dimaksud.

Tabel 35 Capaian IK 18

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW II	2025	TW II 2025	s/d TW II 2024	TW II 2024
Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	88,5	88,5	99,19	99,19	100

Analisa penyebab keberhasilan pencapaian IKU dikarenakan beberapa faktor antara lain:

1. Pengawas perikanan sebagai garda terdepan dalam pelayanan SLO telah melaksanakan kegiatan sebagaimana yang diamanatkan UU dan telah memenuhi etika pelayanan publik sehingga pengguna jasa menerima manfaat pelayanan dengan baik;
2. Pengguna jasa telah mendapatkan fasilitas, yang nyaman selama bermitra baik dalam penggunaan aplikasi yang memudahkan seperti e-SLO ataupun ruang tunggu yang nyaman;
3. Keterbukaan informasi terkait prosedur penerbitan ataupun kendala yang mengakibatkan SLO tidak dapat diterbitkan disampaikan dengan baik kepada pengguna jasa.

Analisa kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain

1. Perawatan Gedung, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai adalah salah satu aspek yang secara langsung berdampak kepada kenyamanan para pengguna jasa;
2. Penggunaan aplikasi e-SLO yang mempermudah permohonan keberangkatan kapal perikanan;
3. Internalisasi nilai ASN Ber-AKHLAK kepada para Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K melalui kegiatan apel pagi sehingga memupuk kesadaran dan aktualisasi dalam melaksanakan pelayanan.

C. Realisasi Anggaran

Anggaran yang dikelola Pangkalan Pengawasan SDKP Tual pada Tahun 2025 sesuai DIPA Nomor: SP DIPA- 032.05.2.440853/2025 tanggal 12 Desember 2024, mendapat alokasi dana sebesar Rp41,512,621,000,- dengan pagu RM sebesar Rp34,909,456,000,- dan pagu PNPB sebesar Rp6,603,165,000,- Sampai dengan akhir triwulan II tahun 2025 Pangkalan PSDKP Tual telah memiliki realisasi sebesar Rp13,036,156,294,- atau 31,40% berdasarkan data OMSPAN.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Selama triwulan II Tahun 2025, kinerja Pangkalan PSDKP Tual telah mencapai hasil yang baik. Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Program, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Pada Tahun 2025, terdapat 21 Indikator Kinerja dimana 11 diantaranya merupakan IKU dan 10 IKM yang menjadi komitmen kinerja UPT Pangkalan PSDKP Tual. Pencapaian IK triwulan II tahun 2025 dengan nilai NKO sebesar 104,13 diperoleh terhadap penilaian 11 Indikator Kinerja, 4 IK berpredikat istimewa dan 7 IK lainnya berpredikat baik.

B. Saran dan Rekomendasi

Memperhatikan analisis capaian kinerja sebagaimana diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya dan dalam rangka upaya untuk meningkatkan kinerja Pangkalan PSDKP Tual pada periode triwulan III Tahun 2025. Saran dan Rencana untuk memperbaiki capaian IK pada triwulan III Tahun 2025 terangkum dalam Tabel berikut :

Tabel 36 Saran dan Rencana Tindak Lanjut atas pencapaian kinerja Pangkalan PSDKP Tual Periode Triwulan III 2025

No	Saran	Rencana Aksi	Waktu
1	Melaksanakan percepatan tindak lanjut hasil Analisa SPKP	• Menugaskan seluruh personal pada satwas maupun wilker dalam kegiatan permintaan keterangan	• Triwulan III
2	Melaksanakan evaluasi rutin terhadap capaian kinerja Pangkalan PSDKP Tual	• Melakukan rapat evaluasi	• Triwulan III

PANGKALAN PSDKP TUAL

Jalan Bukit Dumar No.1 Kompleks PPN Tual
Kota Madya Tual Kecamatan Dullah Selatan
Provinsi Maluku - 97611



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpsdkp@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sigit Bintoro
Jabatan : Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pung Nugroho Saksono
Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pihak Pertama
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual

Pung Nugroho Saksono

Sigit Bintoro

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	1. Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (indeks)	82
2.	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	2. Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (Nilai)	75
		3. Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan (Nilai)	75
3.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	4. Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (Indeks)	100
4.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	5. Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan (Indeks)	100
5.	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	6. Indeks operasi kapal pengawas (indeks)	92
		7. Indeks operasi speedboat pengawas (indeks)	92
6.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	8. Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%)	100
7.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	9. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	81
		10. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	81
8.	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	11. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	94
9.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam	12. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran satker Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	71,5

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	13. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satker lingkup Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	92
		14. Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Tual (indeks)	81
		15. Penilaian Mandiri SAKIP satker Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	86
		16. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Pangkalan PSDKP Tual (%)	100
		17. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95
		18. Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	88,5
		19. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	80
		20. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Tual (inovasi)	1
		21. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)	70

Data Anggaran:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
	a. Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	19.363.404.000
	b. Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan	256.615.000
	c. Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1.809.869.000
	d. Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan	100.000.000
2.	Program Dukungan Manajemen	19.982.733.000
Total Anggaran Pangkalan PSDKP Tual Tahun 2025		41.512.621.000

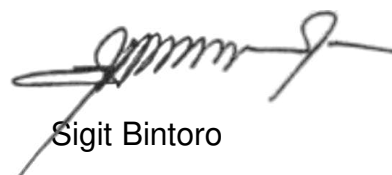
Jakarta, 24 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pihak Pertama
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual



Pung Nugroho Saksono



Sigit Bintoro



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpsdkp@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erik Sostenes
Jabatan : Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pung Nugroho Saksono
Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

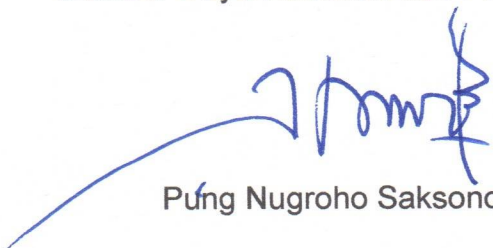
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

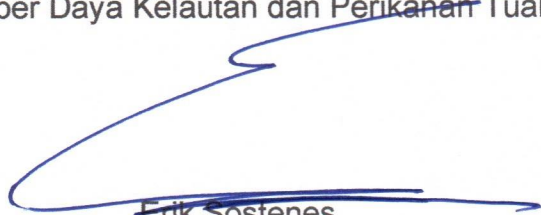
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Maret 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pihak Pertama
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual


Pung Nugroho Saksono


Erik Sostenes

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	1. Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (indeks)	82
2.	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	2. Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (Nilai)	75
		3. Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan (Nilai)	75
3.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	4. Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (Indeks)	100
4.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	5. Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan (Indeks)	100
5.	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	6. Indeks operasi kapal pengawas (indeks)	92
		7. Indeks operasi speedboat pengawas (indeks)	92
6.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	8. Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%)	100
7.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	9. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	81
		10. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	81
8.	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	11. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	94
9.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran satker Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	71,5
		13. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satker lingkup Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	92

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		14. Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Tual (indeks)	81
		15. Penilaian Mandiri SAKIP satker Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	86
		16. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Pangkalan PSDKP Tual (%)	100
		17. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95
		18. Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	88,5
		19. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	80
		20. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Tual (inovasi)	1
		21. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)	70

Data Anggaran:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
	a. Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	19.363.404.000
	b. Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan	256.615.000
	c. Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1.809.869.000
	d. Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan	100.000.000
2.	Program Dukungan Manajemen	19.982.733.000
Total Anggaran Pangkalan PSDKP Tual Tahun 2025		41.512.621.000

Jakarta, 17 Maret 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Saksono

Pihak Pertama
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual



Erik Sostenes



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAM www.kkp.go.id, SUREL ditjenpsdkp@kkp.go.id

Nomor : B.2324/DJPSPDKP.1/KP.720/VII/2025 15 Juli 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Capaian Kinerja Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Ditjen PSDKP Semester I tahun 2025

Yth. Para Kepala UPT lingkup Ditjen PSDKP

Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi Nomor 1137/SJ.3/KP.720/VII/2025 hal: Data Capaian dan Evaluasi Capaian Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Triwulan II/Semester I tahun 2025, kami sampaikan nilai IP ASN Semester I Tahun 2025 masing-masing unit kerja lingkup Direktorat Jenderal PSDKP sebagaimana terlampir. Secara kumulatif nilai IP ASN Direktorat Jenderal PSDKP adalah 82,43 telah melebihi target senilai 74.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Sekretaris Direktorat Jenderal,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Suharta

Tembusan:
Direktur Jenderal PSDKP

Lampiran
 Nomor : B.2324/DJPSDKP.1/KP.720/VII/2025
 Tanggal : 15 Juli 2025

Rekapitulasi Nilai Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP Semester I Tahun 2025

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)	Kompetensi (bobot 40)	Kinerja (bobot 30)	Disiplin (bobot 5)	TOTAL	Keterangan
1	SEKRETARIAT DITJEN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	76	22.83	29.49	26.51	5	83.83	TINGGI
2	DIREKTORAT PRASARANA DAN SARANA PENGAWASAN	30	23.83	30.77	25.33	5	84.93	TINGGI
3	DIREKTORAT PENGENDALIAN OPERASI ARMADA	216	23.47	31,88	25.02	5	85.37	TINGGI
4	DIREKTORAT PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN	39	23.46	29.25	26.28	4.9	83,89	TINGGI
5	DIREKTORAT PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN	39	24.36	29.03	26.03	5	84.42	TINGGI
6	DIREKTORAT PENANGANAN PELANGGARAN	33	23.64	30.13	25.3	5	84.07	TINGGI
7	PANGKALAN PSDKP LAMPULO	69	22,97	28.05	25	5	81.03	TINGGI
8	PANGKALAN PSDKP BATAM	101	22.28	28.34	25	5	80.62	SEDANG
9	PANGKALAN PSDKP JAKARTA	101	22.03	31.19	24,95	5	83.17	TINGGI
10	PANGKALAN PSDKP BENOA	82	22.07	31.4	25	5	83.48	TINGGI
11	PANGKALAN PSDKP BITUNG	120	22.38	28.94	24,79	4,97	81.07	TINGGI
12	PANGKALAN PSDKP TUAL	88	22.84	27,99	25	5	80.83	SEDANG
13	STASIUN PSDKP CILACAP	89	21.57	31.06	25	5	82.63	TINGGI
14	STASIUN PSDKP BELAWAN	86	22.5	29.22	25	5	81.72	TINGGI
15	STASIUN PSDKP KUPANG	49	23.27	28.92	24.49	5	81.67	TINGGI
16	STASIUN PSDKP PONTIANAK	90	22.83	31.34	25	5	84.18	TINGGI
17	STASIUN PSDKP TARAKAN	47	22.34	33.72	25.11	5	86.16	TINGGI
18	STASIUN PSDKP TAHUNA	31	23.23	29,95	23.39	5	81.56	TINGGI
19	STASIUN PSDKP AMBON	65	23	33.9	25	5	86.9	TINGGI
20	STASIUN PSDKP BIAK	51	23.04	34.05	24.8	5	86,89	TINGGI

<https://ipasn.sdmao.id/>
 15 Juli 2025



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpsdkp@kkp.go.id

Nomor : B.2332/PSDKP.1/OT.710/VII/2025 15 Juli 2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Persentase Capaian Pelaksanaan Pengendalian
Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Triwulan II
Tahun 2025 Lingkup Ditjen. PSDKP

Yth.

1. Direktur Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP
 2. Kepala UPT Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP
- di
Jakarta

Bersama ini disampaikan Persentase Capaian Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Triwulan II Tahun 2025 Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP sebagaimana terlampir untuk mendapat perhatian pada pelaksanaan realisasi atas rencana pengendalian risiko pada Triwulan II Tahun 2025 sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Suharta

Tembusan:
Direktur Jenderal PSDKP

**LAPORAN PERSENTASE HASIL CAPAIAN
PELAKSANAAN PENGENDALIAN KEGIATAN
BERBASIS MANAJEMEN RISIKO**

DIREKTORAT JENDERAL PSDKP TRIWULAN II TAHUN 2025

Nomor : B.2332/PSDKP.1/OT.710/VII/V2025
Tanggal : 15 Juli 2025

RINGKASAN

Persentase capaian hasil pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko Triwulan II Tahun 2025 diperoleh dari Evaluasi Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) TA 2025 dengan tujuan untuk: 1) memastikan manajemen risiko telah disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2016; 2) memastikan pemanfaatan manajemen risiko dalam pengendalian kebijakan dan kegiatan; 3) memastikan pemantauan terhadap aktivitas respon manajemen risiko; dan 4) memberikan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan manajemen risiko.

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut dalam pelaksanaan manajemen risiko, yaitu: 1) Proses penyusunan identifikasi risiko belum sepenuhnya dapat mengantisipasi risiko secara efektif dan efisien; 2) Pengendalian rutin belum sepenuhnya di dukung dengan bukti pengendalian; 3) Pengendalian berkala belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk bahan pengambilan kebijakan oleh Kepala Satker/Eselon I; 4) Aktivitas/kegiatan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko belum sepenuhnya efektif; dan 5) Substansi pelaporan penyelenggaraan SPIP belum sepenuhnya memadai.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, direkomendasikan kepada Ketua Satgas SPIP Direktorat Jenderal PSDKP agar meningkatkan pengendalian dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Melengkapi data dukung SOP atau bagan arus (*flow chart*) proses bisnis dari aktivitas/kegiatan yang menjadi obyek penilaian risiko untuk kegiatan yang dikendalikan dengan pendekatan manajemen risiko; 2) menginstruksikan pemilik risiko untuk selalu melakukan *monitoring* dan evaluasi atas rencana pengendalian yang telah ditetapkan; 3) menginstruksikan Tim Satgas SPIP dan Tim SPIP Satker lingkup Ditjen PSDKP agar lebih cermat dalam memverifikasi kelengkapan dan keakuratan data pengendalian rutin, berkala dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko; 4) menginstruksikan seluruh pemilik risiko untuk melaksanakan kegiatan pengendalian berdasarkan rencana pengendalian kegiatan/aktivitas yang telah dibuat dan menyampaikan dokumen pelaksanaan kepada Tim SPIP; 5) melaksanakan pemantauan tindak lanjut terhadap seluruh usulan perbaikan atas sisa risiko dari aktivitas pengendalian yang telah dilaksanakan pada Triwulan I TA. 2025; dan 6) melaksanakan koreksi berjenjang dalam rangka penjaminan kualitas laporan penyelenggaraan SPIP. Persentase capaian hasil pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko Triwulan II Tahun 2025 lingkup Direktorat Jenderal PSDKP adalah 100% (seratus persen).

DAFTAR ISI

RINGKASAN	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I INFORMASI UMUM.....	1
A. Dasar Hukum.....	1
B. Tujuan	1
C. Ruang Lingkup	1
D. Batasan	1
BAB II HASIL.....	3
Persentase Hasil Capaian	3

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perhitungan persentase pengendalian kegiatan berbasis MR	3
---	---

BAB I INFORMASI UMUM

A. Dasar Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Kelautan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7/PERMEN-KP/2021 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2024 tentang Pengendalian dengan Pendekatan Risiko di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 5/PERMEN-KP/2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

B. Tujuan

1. Memastikan manajemen risiko telah disusun sesuai dengan Permen KP Nomor 10 Tahun 2016;
2. Memastikan pemanfaatan manajemen risiko dalam pengendalian kebijakan dan kegiatan;
3. Memastikan pemantauan terhadap aktivitas respon manajemen risiko terealisasi;
4. Realisasi atas rencana pengendalian risiko dapat meminimalisasi risiko dan memberikan perbaikan terhadap pelaksanaan manajemen risiko.

C. Ruang Lingkup Evaluasi

Seluruh Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP, yaitu:

1. 1 (satu) Satuan Kerja Pusat; dan
2. 14 (empat belas) Unit Pelaksana Teknis

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

D. Batasan Perhitungan

1. Masa yang dievaluasi : April s.d. Juni 2025
2. Waktu Pelaksanaan Perhitungan : April s.d. 15 Juli 2025
3. Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko dihitung dengan formula, sebagai berikut:

$$X = \frac{a}{b} \times 100$$

Keterangan:

X = Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis MR

a = Identifikasi Risiko

b = Pemantauan Pengendalian Risiko

4. Kebenaran data dan informasi yang diberikan menjadi tanggung jawab Satker.

BAB II

HASIL PENILAIAN

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah dilaksanakan oleh seluruh pimpinan dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP dengan Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan. Berikut Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko dengan hasil pada Tabel. 1 berikut:

No	Satker	Rencana Pengendalian Risiko	Realisasi Pengendalian Risiko	Persentase Capaian IKU MR
1	Sekretariat Ditjen PSDKP	3	3	100%
	Direktorat POA	21	21	100%
	Direktorat PSP	6	6	100%
	Direktorat PPSPD	10	10	100%
	Direktorat PPSDK	6	6	100%
	Direktorat PP	13	13	100%
2	Pangkalan PSDKP Lampulo	17	17	100%
3	Pangkalan PSDKP Batam	14	14	100%
4	Pangkalan PSDKP Jakarta	23	23	100%
5	Pangkalan PSDKP Benoa	30	30	100%
6	Pangkalan PSDKP Bitung	23	23	100%
7	Pangkalan PSDKP Tual	13	13	100%
8	Stasiun PSDKP Belawan	11	11	100%
9	Stasiun PSDKP Cilacap	14	14	100%
10	Stasiun PSDKP Kupang	6	6	100%
11	Stasiun PSDKP Pontianak	16	16	100%
12	Stasiun PSDKP Tarakan	7	7	100%
13	Stasiun PSDKP Tahuna	5	5	100%
14	Stasiun PSDKP Ambon	8	8	100%
15	Stasiun PSDKP Biak	11	11	100%
Total		257	257	100%

Selanjutnya disampaikan bahwa perhitungan persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko ini dilakukan secara terbatas pada informasi yang tertuang di dalam dokumen pemantauan pengendalian risiko yang disampaikan. Adapun kebenaran dan keabsahan informasi tersebut menjadi tanggung jawab pemilik risiko.

a.n. Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Suharta



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpsdkp@kkp.go.id

Nomor : B.2306/DJPSDKP.1/TU.140/VII/2025 10 Juli 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu)
Hal : Penyampaian Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja" Lingkup Ditjen PSDKP Triwulan II Tahun 2025

Yth. Pejabat (daftar terlampir)

Di tempat

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan periode Triwulan II Tahun 2025 khususnya capaian IKU "Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PSDKP", berikut ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Capaian IKU diperoleh berdasarkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang terbit pada periode 1 Oktober 2024 s.d 31 Maret 2025 (Triwulan IV 2024 – Triwulan I 2025) dan telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon II pusat dan unit pelaksana teknis sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.
2. Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 660/ITJ.0/TU.140/VII/2025 tanggal 9 Juli 2025 perihal Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP" Triwulan II Tahun 2025, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode pengukuran hingga Triwulan II Tahun 2025 lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar **100.00% (tuntas 161 rekomendasi dari 161 rekomendasi)**.
3. Rincian capaian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkungan Ditjen PSDKP disampaikan terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Suharta

Tembusan:
Direktur Jenderal PSDKP

Lampiran I Surat Dinas

Nomor :B.2306/DJPSDKP.1/TU.140/VII/2025

Tanggal :10 Juli 2025

Daftar Penerima

1. Direktur Prasarana dan Sarana Pengawasan, Ditjen PSDKP;
2. Direktur Pengendalian Operasi Armada, Ditjen PSDKP;
3. Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Ditjen PSDKP;
4. Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Ditjen PSDKP;
5. Direktur Penanganan Pelanggaran, Ditjen PSDKP;
6. Kepala Bagian Umum, Ditjen PSDKP;
7. Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo, Ditjen PSDKP;
8. Kepala Pangkalan PSDKP Batam, Ditjen PSDKP;
9. Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta, Ditjen PSDKP;
10. Kepala Pangkalan PSDKP Benoa, Ditjen PSDKP;
11. Kepala Pangkalan PSDKP Bitung, Ditjen PSDKP;
12. Kepala Pangkalan PSDKP Tual, Ditjen PSDKP;
13. Kepala Stasiun PSDKP Cilacap, Ditjen PSDKP;
14. Kepala Stasiun PSDKP Belawan, Ditjen PSDKP;
15. Kepala Stasiun PSDKP Kupang, Ditjen PSDKP;
16. Kepala Stasiun PSDKP Pontianak, Ditjen PSDKP;
17. Kepala Stasiun PSDKP Tarakan, Ditjen PSDKP;
18. Kepala Stasiun PSDKP Tahuna, Ditjen PSDKP;
19. Kepala Stasiun PSDKP Ambon, Ditjen PSDKP;
20. Kepala Stasiun PSDKP Biak, Ditjen PSDKP;
21. Ketua Tim Kerja Program dan Data, Ditjen PSDKP.

a.n. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Suharta

Lampiran II Surat Dinas

Nomor :B.2306/DJPSPDKP.1/TU.140/VII/2025

Tanggal :10 Juli 2025

Data Rekapitulasi Capaian IKU

“Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PSDKP” Triwulan II Tahun 2025

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
1	Sekretariat Ditjen PSDKP	58	58	100.00	0	0
2	Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan	0	0	-	0	-
3	Direktorat Pengendalian Operasi Armada	1	1	-	0	-
4	Direktorat Pengawasan SDK	0	0	-	0	-
5	Direktorat Pengawasan SDP	0	0	-	0	-
6	Direktorat Penanganan Pelanggaran	0	0	-	0	-
7	Pangkalan PSDKP Lampulo	2	2	100.00	0	0
8	Pangkalan PSDKP Batam	0	0	-	0	-
9	Pangkalan PSDKP Jakarta	0	0	-	0	-
10	Pangkalan PSDKP Benoa	11	11	100.00	0	0
11	Pangkalan PSDKP Bitung	20	20	100.00	0	0
12	Pangkalan PSDKP Tual	12	12	100.00	0	0
13	Stasiun PSDKP Cilacap	11	11	100.00	0	0
14	Stasiun PSDKP Belawan	22	22	100.00	0	0
15	Stasiun PSDKP Kupang	10	10	100.00	0	0

16	Stasiun PSDKP Pontianak	1	1	100.00	0	0
17	Stasiun PSDKP Tarakan	6	6	100.00	0	0
18	Stasiun PSDKP Tahuna	7	7	100.00	0	0
19	Stasiun PSDKP Ambon	0	0	-	0	-
20	Stasiun PSDKP Biak	0	0	-	0	-
Total		161	161	100.00	0	0

*Note: untuk satuan kerja yang tidak memiliki rekomendasi dari hasil pemeriksaan Itjen KKP, pengisian capaian IKU menggunakan nilai minimal yaitu 95%



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
 LAMAN www.kkp.go.id, SUREL ditjenpsdkp@kkp.go.id

Nomor : B.2286/DJPSPDKP.1/HP.430/VII/2025 9 Juli 2025
 Hal : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Ditjen PSDKP Triwulan II
 Tahun 2025

Yth. 1. Direktur Pengendalian Operasi Armada
 2. Kepala UPT Lingkup Ditjen. PSDKP
 di_ Tempat

Sehubungan dengan pengukuran indikator kinerja Nilai Kepuasan Masyarakat (SKM) Pengguna Layanan Publik Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP Triwulan II 2025, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penghitungan penilaian SKM Triwulan II 2025 dilakukan menggunakan aplikasi Susan KKP melalui laman https://ptsp.kkp.go.id/skm_lama. Berdasarkan hasil validasi SKM Ditjen PSDKP yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2025, capaian SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) Direktorat Jenderal PSDKP, sebagai berikut:

NO	UPP	TW IV	Responden	Nama Produk Layanan
1.	Direktorat POA	95.04	130	1. Pemberian Akses Pemantauan Perikanan 2. Penerbitan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter 3. Analisis Pergerakan Kapal Perikanan
2.	Pangkalan PSDKP Lampulo	85.91	42	Surat Laik Operasi
3.	Pangkalan PSDKP Batam	91.02	163	Surat Laik Operasi
4.	Pangkalan PSDKP Jakarta	97.18	68	Surat Laik Operasi
5.	Pangkalan PSDKP Benoa	92.68	112	Surat Laik Operasi
6.	Pangkalan PSDKP Bitung	94.29	89	Surat Laik Operasi
7.	Pangkalan PSDKP Tual	99.19	65	Surat Laik Operasi
8.	Stasiun PSDKP Cilacap	92.13	66	Surat Laik Operasi

9.	Stasiun PSDKP Belawan	92.34	112	Surat Laik Operasi
10.	Stasiun PSDKP Kupang	84.76	107	Surat Laik Operasi
11.	Stasiun PSDKP Pontianak	94.40	268	Surat Laik Operasi
12.	Stasiun PSDKP Tarakan	91.85	75	Surat Laik Operasi
13.	Stasiun PSDKP Tahuna	98.41	14	Surat Laik Operasi
14.	Stasiun PSDKP Ambon	92.97	94	Surat Laik Operasi
15.	Stasiun PSDKP Biak	100.00	91	Surat Laik Operasi

2. Berdasarkan hasil SKM diatas, kami sampaikan:
- Nilai SKM Direktorat Jenderal PSDKP setelah dikonversi memperoleh nilai **93.27** dengan mutu pelayanan kategori “**Sangat Baik**”; dengan jumlah responden 1496.
 - Apresiasi kepada seluruh UPP karena telah mencapai target atas kontribusi terhadap pencapaian sampai dengan triwulan II Tahun 2025;
 - Agar membuat laporan SKM beserta rencana tindak lanjutnya terhadap 3 unsur terendah dan hal-hal yang perlu mendapat perhatian, serta dilengkapi dengan data dukung, untuk kemudian diupload di Aplikasi SUSAN KKP;
 - Agar mempertahankan dan/atau meningkatkan hasil capaian pada periode triwulan berikutnya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Suharta

Tembusan:

- Direktur Jenderal PSDKP;
- Kepala Pusat Data dan Informasi, Sekjen KKP;
- Inspektur II, Itjen KKP.

